



ISSN 2962-0740



# mediakebijakan



**KETERLIBATAN**

**KELOMPOK RENTAN**

**JADI UKURAN**

# Hey.. Sobat Cendekia

yuk buat video pendek  
edukatif seputar kebijakan  
publik..

## **Durasi Video Max. 90 Detik**

### **Syarat dan ketentuan:**

Topik yang dibahas seputar kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Konten video berdasarkan hasil referensi dari situs web **BSKDN Kemendagri** atau **Youtube BSKDN Kemendagri**.

Video bisa dikirim melalui direct message (DM) Instagram **@bskdn.kemendagri**. Wajib follow akun Instagram **@bskdn.kemendagri** sebelum mengirimkan video Anda. Satu pemenang akan mendapat merchandise menarik dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.



Follow :   BSKDN Kemendagri   @bskdn.kemendagri  @BSKDNKemendagri

# IKHTIAR PENUHI HAK PILIH KELOMPOK RENTAN

Masyarakat Indonesia akan menorehkan sejarah baru sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pasalnya, untuk pertama kalinya Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung secara serentak. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah menjadi selaras. Dengan begitu, pelaksanaan agenda-agenda pembangunan menjadi lebih optimal.

Dalam pelaksanaan pemilu, masyarakat diminta untuk memilih pemimpin sesuai dengan asas yang diterapkan yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya untuk memilih. Mereka disebut sebagai pemilih rentan yang meliputi penyandang disabilitas, pemilih pemula, masyarakat adat, orang yang memiliki problem administrasi secara kependudukan, pengungsi yang kehilangan dokumen kependudukan, narapidana, tahanan, pasien di rumah sakit, hingga pekerja migran yang tidak berkoordinasi dengan kedutaan besar setempat.

Dalam pemilu, kelompok rentan punya hak yang sama dengan warga negara lain untuk berpartisipasi. Hak politik merupakan instrumen dari pemberdayaan rakyat

untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan demokratis, termasuk untuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan.

Memastikan kevalidan dan kredibilitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan kondisi dan fakta dilapangan merupakan salah satu upaya paling dasar yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak pilih kelompok rentan.

Pembaca yang budiman, majalah di hadapan Anda ini akan mengulas bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi hak pilih kelompok rentan. Informasi yang disajikan dalam majalah ini merupakan upaya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memastikan pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan baik.



Kurniasih  
Sekretaris BSKDN Kemendagri



## BINA PRAJA PRESS:

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbang.kemendagri.go.id  
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri  
Kementerian Dalam Negeri

# media kebijakan

SUMBER INFORMASI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2023

## PELINDUNG

MENTERI DALAM NEGERI

## PENANGGUNG JAWAB

YUSHARTO HUNTOYUNGO

## PEMIMPIN REDAKSI

KURNIASIH

## REDAKTUR PELAKSANA

AJI NUR CAHYO

## REDAKTUR

AFERI SYAMSIDAR

AKBAR ALI

ABAS SUPRIYADI

TR FAHSUL FALAH

## PENYUNTING

FRISCA NATALIA

## PELIPUTAN

NOVI FUJI ASTUTI

## PENATA LETAK

FAJAR HARAMUKTI

## ILUSTRASI COVER

FAJAR HARAMUKTI

Diterbitkan oleh:



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemendagri.go.id

Frekuensi terbitan : 2 bulanan  
Nomor ISSN : 2962-0740 (media cetak)

Keterangan : Kategori sosial  
SK No. 29620740/II.7.4/SK.ISSN/01/2023

mulai edisi Vol. 1, No. 6, Januari 2023

jendela BSKDN



Bangun Kolaborasi Riset,  
bersama Tanoto Foundation  
BSKDN berkomitmen Turunkan Stunting

4



lensa matra



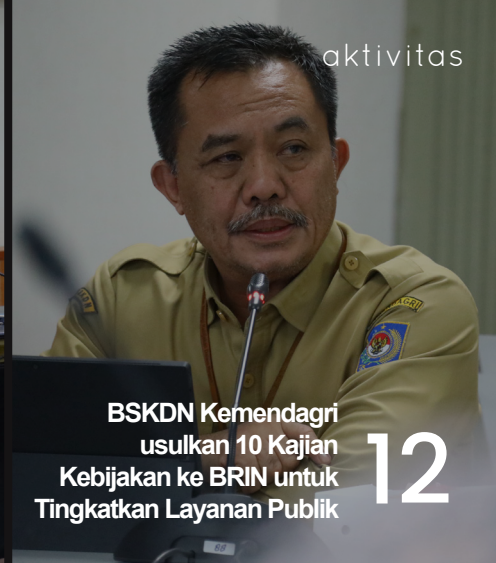
32



jendela BSKDN

**BSKDN Kemendagri Susun Aturan  
Menyoal Tata Kelola Jabatan Analis Kebijakan  
di Kemendagri dan Pemda**

**8**



aktivitas

**BSKDN Kemendagri  
usulkan 10 Kajian  
Kebijakan ke BRIN untuk  
Tingkatkan Layanan Publik**

**12**



aktivitas

**Pemotongan Hewan Kurban di Lingkungan Kemendagri  
Kepala BSKDN: Tingkatkan Core Values dan ASN Berakhlak**

**16**



laporan utama

**Ikhtiar Penuhi Hak Pilih  
Kelompok Rentan**

**22**



laporan utama

**Gen Z dan Milenial  
Tentukan Kesuksesan Pemilu 2024**

**26**



lebih dekat

**Libatkan Ilmu Masyarakat  
agar Kebijakan Lebih Tepat**

**34**



resensi film

**Buya Hamka**

**52**



## **BANGUN KOLABORASI RISET BERSAMA TANOTO FOUNDATION**

### **BSKDN Berkomitmen Turunkan Angka Stunting**

**B**adan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun kolaborasi riset bersama Tanoto Foundation untuk menurunkan angka stunting. Tanoto Foundation merupakan organisasi filantropi independen yang memiliki misi untuk mengembangkan individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, perlu adanya kerja sama berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan stunting, termasuk melibatkan organisasi filantropi. “Permasalahan stunting ini

sangat kompleks, tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah semata tetapi harus melibatkan banyak pihak, termasuk melibatkan organisasi filantropi atau bentuk-bentuk lainnya,” ungkapnya saat memimpin Rapat Kerja Sama Bersama Tanoto Foundation di Ruang Kerja Kepala BSKDN pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Yusharto melanjutkan, melalui kolaborasi riset tersebut BSKDN menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan. Dia meyakini penurunan angka stunting menjadi salah satu tanda peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Sementara itu, Yusharto menjelaskan



Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo hadir dan memimpin serta memberikan arahan pada Rapat Kerja Sama Bersama Tanoto Foundation di Ruang Kerja Kepala BSKDN pada Jumat, 18 Agustus 2023.

ruang lingkup kerja sama dengan Tanoto Foundation tidak hanya meliputi kolaborasi riset.

Dia mengatakan, ke depan BSKDN dan Tanoto Foundation juga akan bekerja sama mengoptimalkan pemanfaatan data untuk mendukung peningkatan kualitas perumusan kebijakan. Lebih lanjut, Yusharto mengaku pihaknya akan memetakan ruang lingkup kerja sama secara lebih rinci melalui kesepakatan kerja sama. “Bukan hanya kolaborasi riset, bentuk-bentuk kerja sama lain akan segera kita lakukan, semoga bisa menjadi upaya yang efektif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada saat ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir *Head of Strategic Planning and Partnership Tanoto Foundation Michael Susanto* yang menerangkan strategi penurunan stunting yang pernah diupayakan pihaknya. Menurutnya, saat ini masih banyak program dan data stunting yang saling tumpang tindih, sehingga dibutuhkan koordinasi antar pihak terkait agar penanganan terhadap stunting lebih efektif. “Jadi pada waktu kami ke daerah untuk stunting intervensi kami adalah aksi *convergensi* manajemen program,” pungkasnya.

• **Novi**



# JELANG PEMILU DAN PILKADA 2024

## Kepala BSKDN: Daerah Harus Menjamin Ketersediaan Anggaran dan Netralitas ASN

**M**enjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntuyungo meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketersediaan anggaran dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pesan tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara Kajian Strategis yang mengusung tema “Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Kegiatan

tersebut berlangsung di Hotel Swiss Belinn Kemayoran pada Kamis, 22 Juni 2024.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, kesuksesan Pemilu 2024 memerlukan sinergi dari seluruh komponen bangsa. Hal itu mulai dari penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan penuh integritas.

“Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan.



# DA SERENTAK TAHUN

## K, HUKUM, DAN PEMERINTAHAN GI KEBIJAKAN DALAM NEGERI ERIAN DALAM NEGERI

23 | SWISS-BELINN HOTEL KEMAY

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo menjadi *keynote speaker* dalam acara Kajian Strategis yang mengusung tema “Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”, di Hotel Swiss Belinn Kemayoran pada Kamis, 22 Juni 2024.

Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang,” terangnya.

Sementara itu, dari sisi legislatif hendaknya juga menyusun produk legislasi yang adil. Kemudian media atau pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Non-Governmental Organization (NGO), dan masyarakat diharapkan menjauhi hoaks dan mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai.

“Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi

dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi yang timbul akibat politik elektoral,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, hadir Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim sebagai narasumber. Dia mengatakan, kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 ditentukan oleh beragam faktor. Salah satu di antaranya sikap anti politik uang yang ditunjukkan masyarakat dan integritas partai politik yang baik.

### • Novi



# BSKDN Kemendagri Susun Aturan

## Menyoal Tata Kelola Jabatan Analisis Kebijakan di Kemendagri dan Pemda

**B**adan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) terkait Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini sejalan dengan peran penting Analisis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Pesan itu disampaikan Sekretaris BSKDN Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN dalam acara Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Kepmendagri terkait Tata Kelola JFAK di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Selasa, 13 Juni 2023.

Kurniasih menjelaskan, kendati peran Analisis Kebijakan

sangat penting, namun belum ada peraturan spesifik yang mengatur tata kelola JFAK. Hal itu menyebabkan kesimpangsiuran informasi bagi pengampu JFAK dalam melaksanakan tugas, khususnya di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah. “Khawatirnya hal ini akan berdampak pada kualitas rekomendasi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang dihasilkan,” tuturnya.

Selain itu, tambah dia, pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tugas dan fungsi (Tusi) BSKDN yang meliputi kepegawaian pada perangkat daerah, termasuk pembinaan terhadap tata kelola jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan jumlah Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan pemer-



Sekretaris BSKDN Kemendagri, Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN Kemendagri dalam acara *Kick Off Meeting* Penyusunan Rancangan Kepmendagri terkait Tata Kelola JFAK di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Selasa, 13 Juni 2023.

intahan daerah berdasarkan data Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) per 4 Juni kurang lebih 1.087. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. “Kami berpandangan perlu adanya unit di internal Kemendagri dan pemerintah daerah yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pembinaan JFAK,” tambahnya.

Kurniasih berharap, LAN selaku instansi pembina dapat mendukung Kemendagri khususnya BSKDN untuk menjadi *leading sector* dalam melakukan pembinaan terhadap JFAK. “Sehingga kita dapat memastikan adanya peningkatan profesionalisme, kapasitas dan kualitas kebijakan dalam negeri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN

RI Tri Widodo W. Utomo. Dia mengatakan, perubahan organisasi dan birokrasi dari struktural menjadi berbasis kompetensi, telah mendorong semakin banyaknya jabatan fungsional.

Perubahan yang sangat masif tersebut membawa banyak pertanyaan termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan JFAK. Pertanyaan semakin bertambah seiring dengan belum adanya peraturan spesifik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatur hal tersebut. Kondisi itu menimbulkan kesan seolah-olah tidak ada kepastian hukum dalam mendukung profesionalisme maupun karier bagi para pejabat fungsional terutama analisis kebijakan. “Lahirnya draf kebijakan yang diinisiasi oleh BSKDN ini memiliki urgensi yang sangat tinggi,” tegasnya.

• **Novi**



# PANGKAS PROSEDUR LAYANAN PUBLIK,

## Kepala BSKDN: Inovasi Kunci Kualitas Birokrasi

**K**epala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan, inovasi menjadi kunci kualitas birokrasi. Pasalnya, dengan inovasi prosedur pelayanan publik yang panjang dapat dipangkas lebih ringkas, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik dengan lebih cepat dan mudah.

“Semua urusan melewati prosedur yang sangat panjang dan untuk sebagian orang itu akan sangat rumit. Dengan adanya inovasi akan terjadi pemangkasan atas langkah-langkah tersebut. Ini kebutuhan sekali lagi untuk menjadikan alur birokrasi kita itu menjadi lebih ringkas dan berkualitas,”

ungkapnya saat melakukan sesi *podcast* di Studio BSKDN pada Selasa, 27 Juni 2023.

Lebih lanjut Yusharto mengatakan, keberadaan inovasi digital administrasi pemerintahan, diharapkan dapat memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing-masing daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan lainnya.

“Lewat inovasi administrasi dapat memberikan kemudahan dalam bentuk percepatan layanan kepada masyarakat dan ini menjadi bagian dari inovasi administrasi pemerin-



tahan,” ungkapnya.

Dia menuturkan, birokrasi yang berkualitas dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, dirinya berharap agar setiap OPD terus memberikan pelayanan terbaik dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

“(Dengan inovasi) OPD dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk dilayani dan (dapat meningkatkan) tingkat kepuasan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Yusharto mengapresiasi kesadaran berinovasi Pemda yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu tercermin dari jumlah Pemda yang melapor-

kan inovasinya pada sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) yang merupakan bagian dari penilaian gelaran Innovative Government Award (IGA). Pada tahun 2022, sebanyak 510 Pemda melaporkan inovasinya dengan total inovasi sebanyak 26.900 inovasi. Dirinya berharap akan semakin banyak daerah yang melaporkan inovasinya pada gelaran IGA tahun 2023.

“Kesadaran pegawai yang ada pada OPD di setiap pemerintah daerah semakin baik, bahwa inovasi ini menjadi kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan, sehingga harapannya tahun ini semakin banyak daerah yang melaporkan inovasinya,” pungkasnya.

• **Novi**

... aktivitas



Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo saat menghadiri undangan Persentasi dan Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Iptek dan Inovasi Lt. 3 Ged. BJ Habibie BRIN Thamrin pada Selasa, 25 Juli 2023.

# BSKDN KEMENDAGRI USULKAN 10 KAJIAN KEBIJAKAN KE BRIN UNTUK TINGKATKAN LAYANAN PUBLIK

**B**adan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan 10 kajian kebijakan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan publik.

Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menghadiri undangan Persentasi dan Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Iptek dan Inovasi Lt. 3 Ged. BJ Habibie BRIN Thamrin pada Selasa, 25 Juli 2023.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, kajian yang akan disampaikan ke BRIN semula berjumlah 49 usulan. Namun setelah dilakukan simplifikasi jumlahnya menyusut menjadi 10 usulan. Adapun 10 usulan tersebut meliputi strategi optimalisasi peran dan fungsi partai politik; indeks kebutuhan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah; strategi percepatan transformasi digital layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta digitalisasi government dalam pelayanan data dan kependudukan pencatatan sipil.

Usulan selanjutnya melingkupi analisis penerapan standar pelayanan publik di daerah; analisis kebijakan pembangunan daerah; penguatan sistem antikorupsi di desa; analisis dan pemetaan penilaian, evaluasi dan penghargaan inovasi desa; model pembinaan inovasi daerah di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dalam rangka percepatan pembangu-

nan; dan strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah.

Yusharto berharap, 10 usulan tersebut dapat segera direalisasikan pada tahun 2024 mendatang. Terkait pendanaan usulan kajian, dirinya menyarankan agar diupayakan sharing pendanaan dengan kementerian/lembaga lainnya. “Kami harap usulan kajian dapat segera dilaksanakan tahun depan (2024), 10 kajian ini juga diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas (berbagai layanan publik) yang diberikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Yusharto menjelaskan terkait usulan kajian mengenai layanan publik berbasis digital. Dirinya meyakini hasilnya akan membawa peningkatan terhadap efektivitas serta efisiensi layanan publik hingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, dia optimistis ke depan masyarakat yang terpencil pun tidak akan lagi merasa terkucilkan karena dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang tersedia.

“Diharapkan kegiatan (kajian) ini nantinya bisa memberi dukungan terhadap beberapa program BRIN lintas nasional, yaitu peningkatan kualitas layanan untuk daerah dan peningkatan efektivitas serta efisiensi layanan publik,” pungkasnya.

• **Novi**



## KURANGI POLUSI UDARA, BSKDN Kemendagri Dorong Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik

**B**adan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi berbagai inovasi dalam industri otomotif, termasuk inovasi untuk menciptakan kendaraan listrik dengan harga ekonomis. Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo juga mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik guna mengurangi polusi udara.

Komitmen itu disampaikan dalam acara Bazar Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI dan HUT ke-78 Kemendagri. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Parkir Gedung BSKDN Kemendagri pada Senin, 21 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan pengembangan kendaraan listrik secara berkelanjutan membutuhkan kolaborasi

berbagai pihak meliputi universitas, lembaga penelitian, pihak swasta dan pemerintah. "Inovasi dalam industri otomotif terkait kendaraan listrik ini harus terus didukung dan ditingkatkan, bukan hanya terkait tata cara membuatnya, tetapi permasalahan sosial seperti edukasi masyarakat terhadap potensi kendaraan listrik juga bisa menjadi fokus arah penelitian kita," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan, dalam sepuluh tahun terakhir teknologi ramah lingkungan atau green technology telah masif diterapkan di berbagai negara. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dampak buruk akibat pemanasan global. Kendaraan bermotor menjadi salah satu yang ditargetkan beralih menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Dia menceritakan, di beberapa negara maju seperti Inggris





Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntuyungo bersama para pegawai BSKDN dalam acara Bazar Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI dan HUT ke-78 Kemendagri, di Halaman Parkir Gedung BSKDN Kemendagri pada Senin, 21 Agustus 2023.

misalnya telah memberlakukan peraturan untuk wilayah-wilayah tertentu hanya bisa diakses oleh kendaraan listrik. Tidak hanya itu, saat parkir, kendaraan berbahan bakar fosil juga akan dikenakan tarif parkir lebih mahal ketimbang kendaraan berbasis listrik. Langkah tersebut dinilai berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Dia melanjutkan, dengan beralih ke kendaraan listrik masyarakat juga dapat turut berperan mengurangi polusi udara yang menjadi penyebab pemanasan global. “Hal ini (penggunaan kendaraan listrik) memang sudah diterapkan di beberapa negara maju karena sadar bahwa tiada bahan bakar berbasis fosil dan mencegah polusi udara karena kita ini mempersiapkan untuk next generation kita, mereka berhak menghirup udara yang bersih,” ungkapnya.

Dengan teknologi yang terus dimutakhirkan, Kurniasih optimistis penggunaan kendaraan berbasis listrik ke depan akan semakin meningkat seiring kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kendaraan listrik tersebut. “Dengan demikian kita semua bisa mempergunakan dan bisa juga dengan wise menggunakan kendaraan-kendaraan berbasis listrik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kurniasih juga berharap secepatnya kendaraan listrik dapat digunakan sebagai kendaraan dinas di berbagai instansi termasuk BSKDN. “Mudah-mudahan (kendaraan dinas berbasis listrik) sudah bisa masuk untuk penganggaran tahun depan, kita BSKDN bisa menjadi pelopor untuk meminimalisir polusi di Jakarta,” pungkasnya.

• **Novi**

# PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI, KEPALA BSKDN: TINGKATKAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK

**K**epala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo selaku Ketua Panitia Penyelenggara Iduladha 1444 Hijriah di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyaksikan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kemendagri dengan total keseluruhan 425 ekor hewan kurban yang terdiri dari 149 ekor sapi dan 276 ekor kambing, 90 ekor hewan kurban diantaranya dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Sumber Rejeki Pondok Rangan Jakarta pada Jumat, 1 Juli 2023.

Dalam sambutannya Yusharto menekankan, selain

sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT, hendaknya pemotongan hewan kurban di lingkungan Kemendagri juga dimaknai sebagai upaya meningkatkan core values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK atau Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Semuanya ini akan meningkatkan core values BerAKHLAK dengan ketakwaan yang semakin tinggi maka pekerjaan kita akan disertai dengan ketakwaan untuk mencapai kinerja Kemendagri di waktu-waktu yang akan datang,” ungkapnya.



Dirinya melanjutkan, rangkaian kegiatan Iduladha di lingkungan Kemendagri dan BNPP sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Ini dimulai dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada panitia penyelenggara Iduladha di Halaman Masjid An Nuur Kemendagri pada Senin, 26 Juni 2023.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban di wilayah perbatasan pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2023. Wilayah perbatasan itu di antaranya Sarasan Kepulauan Riau, Motaain dan Wini Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, pemotongan hewan

kurban di lingkungan Kemendagri berlangsung pada Sabtu, 1 Juli 2023.

“Realisasi pelaksanaan Idul Kurban yang hari ini sudah mencapai kurang lebih 425 hewan kurban. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pejabat dari komponen mulai dari pimpinan tingkat madya, pimpinan tingkat pratama, dan seluruh staf yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban hingga hari ini,” pungkasnya.

• **Novi**

LAPORAN UTAMA



# Keterlibatan Kelompok Rentan JADI UKURAN

**S**istem demokrasi yang diterapkan Indonesia mentradisikan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu menggambarkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, serta kepada rakyatlah para pejabat bertanggung jawab atas tindakannya.

Kebanyakan negara demokrasi, memandang pemilu sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis diaduknya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kualitas pelaksanaan pemilu dinilai menentukan masa depan demokrasi.

Adapun prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis tercermin dari setiap warga negara yang memiliki hak turut aktif dalam proses politik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, pemenuhan terhadap hak pilih masyarakat semestinya menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu. Khususnya bagi mereka yang masuk dalam kategori pemilih rentan.

## **Pemilih Rentan**

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) pada Pemilu Serentak Tahun 2019, menunjukkan bahwa pemilu inklusif dan pengawalan terhadap hak politik untuk kelompok rentan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan

baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak hanya itu, pemilu juga masih mengalami kendala secara teknis maupun non teknis, sehingga perlu kerja ekstra dari semua pihak untuk memastikan pemilu atau pemilihan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok rentan.

Dalam konteks pemilu inklusif, kelompok rentan tidak digeneralisasi hanya pada penyandang disabilitas. Namun, kelompok rentan tersebut juga mencakup lansia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 3, dan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok rentan sering disebut sebagai kelompok yang tidak dapat menolong dirinya sendiri atau kelompok yang rawan terhadap diskriminasi, kelompok masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan kesulitan menyalurkan hak politik dalam proses pemilu atau pun pemilihan kepala daerah.

Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja salah satu alasan yang mengakibatkan kealpaan masyarakat adat dalam menyalurkan hak politiknya adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang proses pengajuannya dinilai masih kurang inklusif. Selain masyarakat adat yang sulit memiliki KTP elektronik, sejumlah

kerawanan lain dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 juga diprediksi datang dari berbagai aspek. Aspek kerawanan tersebut meliputi pelaksanaan pemilu di provinsi baru atau daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua.

“Mitigasi dampak penggunaan media sosial, dan juga pemenuhan hak memilih dan dipilih, kerawanan hak pilih kelompok rentan masuk dalam isu strategis kerawanan pemilu,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam acara Forum Diskusi Aktual (FDA) Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Hotel Royal Padjajaran Bogor pada Senin, 20 Februari 2023.

Pelayanan terhadap kelompok rentan perlu berpegang pada prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “Leave No One Behind” atau “Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun”. Prinsip tersebut memastikan tidak boleh ada satu pun pemilih yang tidak tercatat dalam DPT. Berpegang pada prinsip SDGs tersebut, berarti siap memastikan hasil pemilu lebih responsif, inklusif, partisipatif, dan dapat merepresentasikan setiap lapisan masyarakat.

Bawaslu bertekad akan mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu 2024 dengan menindak tegas temuan atau laporan-laporan dugaan pelanggaran sedini mungkin. Pencegahan juga dapat dilakukan secara representatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu nanti. Seperti halnya yang sudah dilakukan Bawaslu



**Rahmat Subagja**  
Ketua Bawaslu



melalui programnya Desa Anti Politik Uang atau KPU dengan programnya Kampung Pemilu hingga Desa Peduli Pemilu. “Nanti mungkin Desa Anti Politik SARA ke depan kita perlu buat itu,” tambahnya.

#### **Peta Kerawanan Kelompok Rentan**

Pengawasan terhadap kelompok rentan dalam pemilu bisa diupayakan lebih awal dengan melakukan pemetaan terhadap kerawanan kelompok rentan di setiap wilayah. Bagja mengatakan pihaknya tengah melakukan pemetaan tersebut. Di samping itu, Bawaslu juga terus berupaya memperkuat sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor). Aplikasi ini terintegrasi menyatukan data penanganan pelanggaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia dalam satu sistem.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 diterangkan bahwa Bawa-

lu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggara pemilu.

Kampanye menjadi salah satu rangkaian dari penyelenggaraan pemilu yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya oleh KPU. Kampanye akan berlangsung selama 75 hari dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Dengan demikian, Bawaslu mengimbau peserta pemilu atau partai politik dapat menahan diri untuk melakukan kampanye sebelum waktunya. Bawaslu juga berharap setiap peserta pemilu dapat memanfaatkan waktu kampanye secara maksimal.

Sementara itu, meminimalisasi permasalahan terkait dengan kelompok rentan juga bisa dengan mengoptimalkan peran RT dan RW dalam member-



ikan pendamping ke pada warga di wilayahnya yang membutuhkan dukungan. Langkah ini dinilai tepat karena ketua RT dan RW dianggap paling tahu kondisi kelompok rentan di daerahnya.

“Kemudian (kami) juga mendorong setiap TPS yang terdapat penyandang tunanetra untuk menyediakan tempat braille, mendorong penentuan lokasi TPS yang ramah terhadap akses disabilitas, misalnya harus datar, kemudian tidak terlalu sulit dijangkau,” jelasnya.

Terkait kelompok rentan disabilitas, anggota KPU Betty Epsilon Indroos mengatakan pihaknya telah membaginya ke dalam beberapa kategori meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik netra, sensorik rungu, dan sensorik wicara. Berdasarkan kategori tersebut, jumlah sementara pemilih disabilitas Pemilu 2024 berjumlah 352.748, dengan persentase disabilitas fisik 0,046 persen atau 94.337, dis-

abilitas intelektual 0,025 persen atau 30.053, disabilitas mental 0,029 persen atau 58.818. Kategori lainnya yakni 0,054 persen atau 110.881 disabilitas sensorik netra, 0,008 persen atau 16.542 disabilitas sensorik rungu, dan 0,021 persen atau 42.117 disabilitas sensorik wicara.

Betty mengatakan, data tersebut perlu diperbaharui, mengingat saat petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlil) keliling untuk memastikan kebenaran data pemilih, masih banyak warga yang enggan berterus terang mengenai kondisi keluarganya sebagai penyandang disabilitas. Ketidaktepatan ini akan mempersulit penyandang disabilitas mendapatkan hak pilihnya. “Mungkin kami seharusnya mendapatkan data yang sesuai, tapi tentu berbenturan dengan kondisi di lapangan, yang mana biasanya tidak banyak yang mau declare ada pemilih dengan kondisi seperti ini (disabilitas) di rumahnya,” jelasnya.

Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, penyandang disabilitas sensorik netra akan mendapatkan surat suara yang disiapkan dengan huruf braille. Mengingat tidak semua penyandang disabilitas sensorik netra dapat membaca huruf braille, maka penyelenggara pemilu maupun pemerintah memperbolehkan penyandang disabilitas atau mereka yang tak mampu untuk didampingi orang lain ketika masuk bilik suara. Dengan catatan, bagi para pendamping, baik wali atau orang lain yang dipercaya wajib mengisi form C3 terlebih dulu.

“Jadi mereka boleh pilih siapa yang akan mendampingi dan yang mendampingi harus merahasiakan keterpilihan yang disampaikan oleh yang didampingi ke dalam balik bilik suara,” pungkasnya.

• **Novi**

# IKHTIAR PENUHI HAK PILIH KELOMPOK RENTAN

Teks Novi Foto Dok. BSKDN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jadwal tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Setelah tahap pemungutan suara selesai, akan dilanjutkan dengan tahap penghitungan suara di hari berikutnya pada 15 Februari 2024.

Kerap dimaknai sebagai pesta demokrasi, dalam penyelenggaraan pemilu masyarakat dapat turut serta menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa dan negaranya. Masyarakat memilih pemimpinnya berdasarkan hak pilih yang mereka miliki. Guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas, masyarakat dituntut untuk menggunakan hak pilih tersebut sesuai dengan asas pemilu yang berlaku yakni langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kendati demikian, dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya untuk memilih. Mereka disebut sebagai pemilih rentan yang meliputi penyandang disabilitas, pemilih pemula, masyarakat adat, orang yang memiliki problem administrasi secara kependudukan, pengungsi yang kehilangan dokumen kependudukan, narapidana, tahanan, pasien di

rumah sakit, hingga pekerja migran yang tidak berkoordinasi dengan kedutaan besar setempat.

Permasalahan tersebut mendorong berbagai lembaga termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk saling berkolaborasi melakukan diskusi, telaah, hingga kajian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkaya informasi dan menyamakan sikap atas masalah pemilih rentan dalam pemilu. Upaya itu diharapkan dapat menjadi titik terang bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## Tingkatkan Kajian

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun mengalami perbedaan. Hal ini seiring dengan proses perkembangan demokrasi yang terus mengalami perubahan hingga penyempurnaan dalam setiap periodenya. Pemilu periode 2024 dihadapkan pada masalah pemenuhan hak pilih kelompok rentan yang belum mendapat banyak perhatian.

Upaya paling dasar yang bisa dilakukan untuk mengata-





si hak pilih kelompok rentan adalah dengan memastikan kevalidan dan kredibilitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Dalam hal ini, semua orang menyadari bahwa daftar pemilih merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial dan sangat strategis bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari penyelenggara pemilu untuk melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik, guna terciptanya daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini. Mengingat DPT yang berkualitas, akan berpengaruh terhadap kualitas proses maupun hasil pemilu menjadi lebih baik. Sebaliknya, DPT yang memiliki banyak permasalahan cenderung menghambat proses dan hasil pemilu sehingga legitimasinya akan dipertanyakan.

Terkait hal itu, BSKDN tengah mempersiapkan kajian-kajian strategis mengenai hak pilih kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya nanti, BSKDN akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menghasilkan kajian yang dapat mendorong proses kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024. Lembaga yang berkolaborasi dengan BSKDN salah satunya adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kajian strategis ini merupakan upaya BSKDN dalam mendukung terseleng-

garanya pemilu yang lebih berkualitas.

Demikian disampaikan Sekretaris BSKDN Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN memberikan arahan dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) yang mengusung tema “Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. “Kita tinggal satu tahun lagi akan melaksanakan pemilu, kita berharap pemilu itu bisa berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang bermutu dan berintegritas,” ungkapnya di Hotel Royal Padjadjaran Bogor pada Senin, 20 Februari 2023.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Jumlah itu setelah KPU menyatakan bahwa Partai Ummat lolos verifikasi faktual. Meskipun sebelumnya partai tersebut sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, Partai Ummat telah melakukan verifikasi ulang perbaikan dan dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.

Selain 18 partai nasional, 6 partai politik lokal Aceh juga menjadi peserta pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai



Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

### **Pemilu Terbesar dan Terkompleks**

Menurut Kurniasih, pemilu 2024 akan menjadi pemilu terbesar dan terkompleks dalam sejarah pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar setiap lembaga mengambil peran dalam menyukseskan gelaran tersebut. Dia juga mengingatkan jajarannya agar meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

“Kita yang notabennya di Kementerian Dalam Negeri awareness kita mesti kita tingkatkan. Terhadap apa?

perkembangan-perkembangan politik yang terus bergerak secara masif dari hari ke hari,” ungkapnya.

Perkembangan pemilu dari waktu ke waktu yang terus mengalami peningkatan dari sisi partisipasi pemilih. Seperti halnya peningkatan yang terjadi pada pemilu 2014 ke pemilu 2019, dengan prosentasi pemilih dari 69,58 persen menjadi 81,97 persen. Selain tingkat partisipasi pemilih yang secara kuantitatif semakin membaik, pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu mendorong peningkatan kualitas partisipasi. Hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kampanye, pemberantasan hoax, money politic, hingga penegakan sanksi pelanggaran pemilu.

Kurniasih menjelaskan urgensi hak pilih dalam pemilu. Menurutnya, hak pilih merupakan bentuk partisipasi politik sekaligus dapat dikatakan sebagai bagian dari bela negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bukan hanya sarana pergantian pemimpin secara konstitusional, pemilu juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan, pelaksanaan pemilu harus berprinsip pada aksesibilitas, karenanya pemerintah dan penyelenggara pemilu harus melakukan perlindungan dan pemenuhan hak

ENIN, 20 FEBRUARI 2023

Royal Pajajaran Hotel

KDN Kemendagri @bskdn.kemendagri @BSKDNKemendagri



kelompok rentan. Hal ini karena dalam Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

“Berkaca pada pemilu 2019, masih terdapat kendala terkait TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat, maupun proses perekaman KTP elektronik untuk narapidana yang masih perlu dioptimalkan,” tegasnya.

Kurniasih menjelaskan, terkait dengan pendataan calon pemilih ke dalam DPT merupakan langkah awal yang strategis dalam pemenuhan hak pilih

kelompok rentan. Oleh karena itu, pihaknya menilai adanya forum diskusi lintas kementerian dan lembaga jelang pemilu 2024 sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang efektif dan lebih baik.

“Forum diskusi aktual ini kita laksanakan guna mendapatkan telaah-telaah yang bersifat strategis yang kemudian akan kita sampaikan kepada Pak Menteri berkaitan dengan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Periode 2022-2027 Rahmat Bagja, Anggota

KPU RI Periode 2022-2027 Betty Epsilon Idroos, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Narasumber lainnya yang turut hadir dalam diskusi tersebut yakni Kepala Seksi Fasilitas Pendataan Penduduk Wilayah I Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, serta Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi.


• Novi

... laporan utama

# *Gen Z dan Milenial* **TENTUKAN KESUKSESAN PEMILU 2024**

Teks Novi Foto Freepik.com





**K**omisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Berdasarkan data yang dihimpun, DPT tersebut didominasi oleh anak muda yang sering disebut sebagai generasi Z dan milenial. Tak heran bila kemudian sejumlah pakar berpendapat keduanya sebagai penentu kemenangan Pemilu 2024 mendatang. Generasi Z atau Gen Z adalah sebutan bagi mereka yang lahir di antara tahun 1995 sampai dengan 2000-an. Generasi pasca milenial ini jumlahnya sekitar 29,23 persen dari total penduduk Indonesia.

Pada DPT Pemilu 2024 jumlah Gen Z mencapai 46.800.161 atau 22,85 persen. Sementara itu, pemilih dari generasi milenial berjumlah 66.822.389 orang atau 33,60 persen. Generasi milenial sendiri adalah sebutan bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1994. Jumlah total dari keduanya mencapai 113. 622.550 pemilih, maka dari itu jumlah pemilih muda mendominasi DPT Pemilu 2024 dengan presentase 56,45 persen.

#### **Pemilih Pemula yang Rentan**

Terlepas dari jumlahnya yang mendominasi, anak muda atau pemilih pemula ternyata juga masuk dalam daftar pemilih rentan karena berbagai faktor. Anak muda sering kali disebut minim pengetahuan politik, sehingga mereka dianggap tidak bisa membuat keputusan sendiri karena sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain yang dipandang mampu mengarahkan. Minimnya pengetahuan tersebut juga berpotensi menjadikan anak muda rentan terjebak politik uang dalam Pemilu. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak pilih di kalangan anak muda, terutama pemilih pemula.

“Anak muda itu juga bisa menjadi kelompok rentan terkait dengan kemerdekaannya di dalam mengambil keputusan dan mengeksekusi hak suara mereka yang dalam banyak hal juga masih direpresi oleh orang yang merasa lebih tua atau lebih mampu mengarahkan mereka dalam membuat keputusan” ungkap perwakilan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Hotel Royal Padjajaran Bogor pada Senin, 20 Februari 2023. Kegiatan tersebut digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam



Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Menurut Titi, setiap pemilih mestinya mendapatkan informasi dengan baik mengenai serangkaian tahapan Pemilu serentak 2024. Hal ini diharapkan ketika pemilih terinformasi dengan baik, maka mereka tidak akan terpengaruh hoaxs. Bagi Titi, seseorang yang tidak mudah mendapatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Pemilu juga dianggap sebagai kelompok rentan.

“Kalau dia tidak bisa mendapatkan informasi dengan baik dia juga adalah kelompok rentan dalam Pemilu dan itu banyak sekali,” tambahnya.

Dia mengatakan, Indonesia telah menerapkan skema terbaiknya dalam memfasilitasi hak pilih terkait penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dibukti-

kan dengan Pemilu di Indonesia yang sudah menerapkan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, Pemilu di Indonesia juga sudah menggunakan mekanisme sensus yang disebut pencocokan dan penelitian atau coklit. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Coklit dilaksanakan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.

Coklit untuk Pemilu 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Dalam rentang waktu tersebut, Pantarlih telah mengunjungi warga sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing.

Adapun hal yang perlu diperhatikan warga saat rumahnya disambangi

oleh Petugas Pantarlih di antaranya menerimanya dengan baik, menunjukkan KK dan KTP-el dan memberikan keterangan yang benar dan akurat kepada Petugas Pantarlih.

Kendati demikian, Titi sangat menyanggah adanya ketidakseragaman pemahaman antar jajaran penyelenggara Pemilu dan para pemangku kepentingan terkait konsep Pemilu inklusif. Masih ada petugas Pantarlih yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dengan benar, yang mana harusnya mendatangi rumah warga satu per satu, yang dilakukan justru hanya meminta warga mengumpulkan KTP-el dan KK via WhatsApp.

“Jadi hal yang sebenarnya secara teknis itu sudah difasilitasi melalui regulasi, kemudian terdistorsi oleh praktik di lapangan karena perbedaan



implementasi oleh orang per orang petugas di lapangan, dan ini jadi tantangan besar untuk kita semua.” ungkapnya.

### **Bangun Kerja Sama Lintas Lembaga**

Sementara itu, untuk menghasilkan data pemilih yang komprehensif dan akurat dibutuhkan kerja sama berbagai pihak. Terkait upaya pemenuhan hak pilih pemilih pemula yang masih berstatus sebagai pelajar, Erikson P. Manihuruk selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri mengaku pihaknya bekerja sama dengan berbagai lembaga di antaranya KPU dan Kemendikbud.

Melalui Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) yang dikelola Kemendikbud, Dukcapil dapat mengetahui penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun sampai dengan 14 Februari 2024 nanti. Dukcapil juga dapat mengetahui alamat sekolah yang bersangkutan melalui Dapodik tersebut. “Dari Dapodik yang ada, Dinas Dukcapil bisa langsung menjemput bola dengan nama-nama yang sudah tersedia antara data kependudukan dengan Dapodik. Nah ini sudah kita (Dukcapil) lakukan untuk 514 kabupaten/kota, sehingga nanti di saat hari H ada yang belum menerima KTP, kita bisa sampaikan surat keterangan sudah melakukan perekaman (KTP-el),” jelasnya.

Jelang Pemilu 2024, Erikson mengatakan, wilayah Papua menjadi salah satu fokus utama dalam upaya percepatan perekaman KTP-el. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan

menggendeng operator yang ada di Dinas Dukcapil wilayah kabupaten/kota. Dia mengatakan, saat ini perekaman KTP-el di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sudah dapat dipetakan. Melalui peta tersebut, dapat dilihat wilayah mana saja yang membutuhkan perlakuan khusus terkait kekurangan perekaman.

“Kalau untuk yang paling utama kita lakukan adalah wilayah Papua Pegunungan, kalau yang lain sudah di atas 80 persen. Kemudian untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah mendekati 90 persen ini sedang dilakukan kegiatan di sana bagaimana perekaman ini bisa diselesaikan dengan cepat khusus di Papua Pegunungan,” pungkasnya.

### **• Novi**

... lensa matra





## Swafoto *Sunrise* di Bukit Penanjakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Wisatawan ber-swafoto di bukit Penanjakan sambil menikmati *sunrise* keindahan alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bukit Penanjakan merupakan spot foto terbaik yang ada di TNBTS untuk mengabadikan keindahan alam yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Foto Aji



••• lensa matra





## **Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

Keindahan alam Gunung Batok, Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang terabadikan pada saat sunrise. Terdapat lautan pasir yang luas, kaldera Gunung Bromo dan Pura Poten yang sering dijadikan tempat peringatan hari raya umat Hindu di kawasan TNBTS.

Foto Aji



Nama  
**Dr. Bartoven Vivit Nurdin**

Tempat/tanggal Lahir  
**Padang, 1 April 1977**

Pekerjaan  
**Dosen Sosiologi Universitas Lampung**

# LIBATKAN ILMU MASYARAKAT

## Agar Kebijakan Lebih Tepat

**K**etertarikannya terhadap masyarakat dan kebudayaan masih terus berlanjut. Hingga saat ini, dirinya mengaku masih meneliti tentang hal tersebut, satu di antaranya mengenai masalah-masalah sosial budaya dalam krisis ketahanan pangan di Indonesia. Isu mengenai ketahanan pangan kembali banyak dibicarakan beberapa bulan terakhir ini. Kampanye agar masyarakat mengganti nasi dengan umbi-umbian atau tanaman

lokal lainnya ramai digelorakan.

Menurut Vivit, mengubah pola makan tersebut tentu saja tidak mudah. Sebab, pola makan telah menjadi budaya, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang merasa belum dikatakan makan jika belum makan nasi. Dia tak menampik Indonesia memiliki beragam jenis pangan, sehingga ketahanan pangan bukan menjadi persoalan besar. Namun hal itu tidak bakal terjadi jika masyarakat memanfaatkan kearifan lokal. Namun faktan-

ya, nasi memiliki simbol tertinggi dalam budaya makan masyarakat. Nasi tidak lagi hanya sebagai makanan utama yang mengenyangkan, tetapi sebagai simbol kekayaan atau simbol stratifikasi sosial.

“Ini menjadi pekerjaan yang berat, sebelum mengubah habit masyarakat makan nasi, terlebih dahulu mengubah pola pikirnya mengenai nasi,” jelas Vivit.

Dahulu masyarakat Indonesia ban-

*Di tengah isu pentingnya diversifikasi pangan, Bartoven Vivit Nurdin telah melakukan riset yang menjelaskan sebagian besar rakyat Indonesia merasa belum makan kalau belum mengonsumsi nasi. Mengubah pola makan itu diakuinya bukanlah pekerjaan mudah karena telah menjadi budaya di tengah masyarakat. Pendekatan sosiologi yakni ilmu mengenai masyarakat penting untuk menangannya.*

yang bertani atau berladang. Namun kini menjadi petani tak diminati generasi muda Indonesia. Mereka saat ini banyak yang memilih melakoni profesi lain, seperti pegawai kantor, polisi, tentara, dan profesi lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanian.

Selain itu, pola pertanian zaman dulu lebih mengutamakan kebutuhan keluarga untuk jangka waktu tertentu, misal satu atau dua tahun. Namun saat ini orientasi pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lahan sawah yang semakin sempit karena dijadikan bangunan juga menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia menghadapi masalah ketahanan pangan. Perubahan sosial-budaya termasuk cara bercocok tanam, orientasi bekerja, dan perubahan terkait lainnya telah mempengaruhi ketahanan pangan.

“Jadi tidak ada lagi yang mau bertani, itu menyebabkan ketahanan pangan kita menjadi masalah di Indonesia ini,” kata Vivit.

Dia menjelaskan, untuk mengubah budaya makan masyarakat Indonesia harus dilakukan dari sisi pola pikirnya, bukan perilakunya. Sebab, ketika nasi menjadi simbol harga diri, kekayaan, stratifikasi sosial, dan lainnya bakal sulit diubah. Hal itu dapat dialami dengan ilmu yang mempelajari masyarakat seperti sosiologi dan antropologi. “Itu perlu sosialisasi dan adaptasi yang lama, walaupun awalnya banyak tentangan tapi sosialisasi harus dimulai dari dalam (keluarga) bukan dipaksa dari atas,” jelasnya.

#### **Belum banyak dilibatkan**

Namun sayangnya, ilmu mengenai masyarakat tersebut belum banyak dilibatkan dalam menyusun kebijakan. Padahal setiap kebijakan yang disusun menempatkan masyarakat sebagai sasaran. Dirinya meyakini, keterlibatan sosiolog dalam perumusan kebijakan dapat membuat langkah tersebut diterima oleh masyarakat. Kurangnya keterlibatan sosiolog dalam perumusan kebijakan, membuat program yang disusun sulit terealisasi dengan baik. Persoalan upaya pemerintah yang hendak mengubah pola makan masyarakat agar lebih beragam menjadi salah satu contoh pentingnya melibatkan ilmu kemasyarakatan.

Dia juga memberikan contoh lainnya betapa pentingnya melibatkan ilmu yang mempelajari masyarakat dalam setiap merumuskan kebijakan. Misalnya saat pemerintah berupaya hendak memberikan bantuan rumah bagi masyarakat adat. Namun ternyata bantuan yang diberikan tersebut rupanya tidak mengacu pada rumah adat yang mereka miliki tapi berupa perumahan nasional (perumnas). Upaya itu tentu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Ini mencerminkan pemerintah tidak menempatkan masyarakat sebagai penerima kebijakan yang perlu menjadi pihak penting

yang dipertimbangkan.

Kondisi yang timbul justru gejala penolakan di masyarakat. Minimnya pemanfaatan riset sosiologi juga berdampak terhadap kebijakan yang kerap dinilai kurang efektif dan tidak memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. “Kalau orang yang ahli tentang masyarakat tidak dilibatkan sulit kebijakan itu kemudian akan sukses, paling tidak diterima dulu, baru kemudian dilaksanakan masyarakat,” terang Vivit.

Mempelajari perubahan sosial, penerimaan, dan budaya yang dimiliki masyarakat menjadi penting. Melalui pembelajaran itu dapat dipetakan kebijakan seperti apa yang dapat diberikan kepada masyarakat, sehingga mampu diterima dengan baik.

Dia menegaskan, kebijakan yang hanya melihat dari permukaan tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Hal ini misalnya penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang kerap bersifat sementara. Padahal kemiskinan itu luas, seperti kemiskinan struktural hingga kemiskinan kebudayaan. Hal itu harus dilihat secara lebih komprehensif agar kebijakan yang disusun tepat sasaran.

“Kalau kita ingin membuat masyarakat maju, masyarakatnya dulu yang perlu kita ubah, perilakunya dulu yang perlu kita ubah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap masyarakat di masing-masing tempat memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini juga menentukan pendekatan yang dipilih dalam merumuskan kebijakan. Saat Covid-19 misalnya, pemerintah mewajibkan vaksin kepada masyarakat. Namun ada pula masyarakat yang tak percaya Covid-19 sehingga menolak divaksin. Hal ini memerlukan pendekatan khusus dengan mempelajari karakternya, bukan justru diterapkan tindakan yang bersifat memaksa dengan menggelar razia.

“Cara berpikirnya juga berbeda, karakter-karakter masyarakat ini yang

dipelajari oleh sosiologi. Jadi tentu akan berbeda di setiap masyarakat itu,” jelasnya.

Hal serupa juga berlaku misalnya dalam kebijakan pembangunan jalan tol. Kebijakan tersebut membutuhkan sosiolog untuk melihat kebutuhan masyarakat sekitar terhadap infrastruktur tersebut. Dampak terhadap masyarakat sekitar penting diperhatikan, jangan sampai justru meminggirkan dan membuat masyarakat di daerah yang menjadi lokasi pembangunan tertinggal.

“Jangan sampai pembangunan itu terpisah dengan masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus terlibat dengan pembangunan itu, merasakan dampak positifnya, jangan sampai pembangunan itu kemudian meninggalkan masyarakatnya

sendiri itu yang kita waspadai sebenarnya dan itu peran sosiolog di situ,” terangnya.

Namun, Vivit menyadari sosiolog tidak dapat berdiri sendiri dan tetap perlu bekerja sama dengan lintas disiplin ilmu sosial lainnya. Ini termasuk ilmu eksakta, kesehatan, kedokteran, kesehatan masyarakat, hingga hukum. Namun, sosiologi ini bisa terlibat pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Pelibatan disiplin ilmu dalam perumusan kebijakan itu penting. Jangan sampai pemangku kepentingan justru hanya mengandalkan salah satu disiplin ilmu dalam merumuskan kebijakan.

“Dari sejak dulu saya rasakannya sih masih sangat kurang, sekarang memang lebih baik tapi tetap kurang juga. Saya kira perlu digalakkan lagi pentingnya perspektif sosiologi antropologi dalam kebijakan ini,” jelasnya.

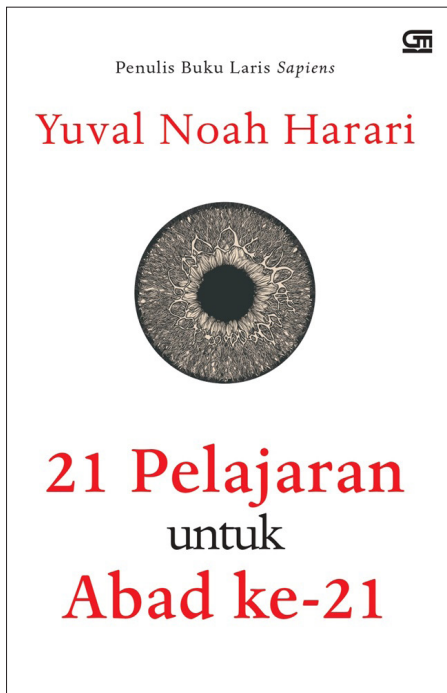
Menurutnya, kebijakan publik harus diputuskan sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Sosiologi dapat memberikan gambaran yang gamblang kepada pemerintah mengenai masalah-masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Vivit menyayangkan pemerintah masih belum banyak memanfaatkan hasil riset sosiologi untuk memperkuat kebijakan publik yang diputuskannya. Oleh karena itu, Vivit berharap ke depan sosiologi lebih banyak dilibatkan untuk mengkaji masyarakat. Bukan hanya ilmu sosiologi, hasil riset harus menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Jika di pusat sudah ada melibatkan sosiologi, tapi kalau di daerah seperti saya yang tinggal di Lampung ini masih minim sekali,” tandasnya.

• Novi



# Realita Dunia Hari Ini, Dalam 21 BAB



**Judul buku:** *21 Pelajaran untuk Abad ke-21*

**Penulis:** Yuval Noah Harari

**Penerbit:** Gramedia Pustaka

Utama

**Tahun Terbit & Cetakan:** Maret  
2023

**Jumlah halaman:**

374 halaman

**ISBN:** 978-602-061-848-7

**B**uku ini berupaya men-yadarkan kita akan keadaan dunia hari ini, berikut segala konsekuensi sosial, politik, dan kulturalnya. Melalui gaya bahasa yang mudah dipahami namun padat, penulis menyajikan realita bahwa kita tengah berada di dunia di mana arus informasi mustahil dibendung, perubahan tatanan besar bisa terjadi dalam semalam, dan bahaya-bahaya yang sebelumnya tampak jauh dapat bergerak sedekat urat leher tanpa kita sadari. Sekurang-kurangnya, ada tiga fakta penting yang diungkap penulis dan layak kita perhatikan secara serius, yaitu perkembangan AI (*Artificial Intelligence*) dan kaitannya dengan pekerjaan di masa depan, terorisme siber, serta propaganda terselubung yang semakin hari semakin halus.

## **Bangkitnya AI, hilangnya pekerjaan**

Seribu tahun yang lalu, orang-orang yang hidup pada zaman kerajaan tidak tahu raja mana yang pasti akan bangkit atau tumbang, pemberontakan mana yang akan berhasil atau menjadi bahan tertawaan, serta berapa lama kerajaan yang mereka tinggali akan bertahan. Namun orang-orang itu tahu pasti, apa pun yang terjadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia masih sama; petani, pedagang, pegawai kerajaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seorang petani mengajari anak-anak mereka cara membajak sawah dengan benar, para pedagang mengajari cara mengatasi tawar-menawar

yang alot, dan anak-anak pegawai kerajaan mengajari anak-anak mereka politik, itu masih tetap relevan sampai anak-anak tadi dewasa, bahkan sampai beberapa ratus tahun berikutnya. Namun itu tidak berlaku lagi sekarang. Teknologi AI mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Bukan tidak mungkin jika dalam beberapa dasawarsa ke depan, AI benar-benar mendominasi kehidupan manusia.

Secara umum, algoritma AI adalah menemukan pola dan menarik kesimpulan dari pola yang teramati. Sekali bajak mesin yang dikendalikan oleh komputer berteknologi AI mampu menganalisis struktur tanah dan menentukan tanaman apa yang paling mungkin memberikan hasil terbaik pada musim tanam berikutnya, apakah keterampilan-keterampilan tradisional yang diajarkan para orang tua petani kita masih relevan? Dan jika para orang tua petani kita mengajarkan keterampilan bertani semata, tanpa melihat perkembangan AI, bagaimana jika ketika dalam sepuluh tahun dunia pertanian telah didominasi oleh AI? Kita yang tidak bisa berkompetisi melawan AI dan tidak bisa menemukan pekerjaan lain tentu akan kelabakan.

AI juga sudah mulai masuk ke ranah negosiasi, itu terbukti dengan munculnya aplikasi yang bisa kita ajak mengobrol dan bertukar pendapat. Barangkali orang kemudian menyanggah dengan mengatakan bahwa mesin tidak akan pernah mengungguli manusia dalam perbincangan, karena mesin tidak

Buku ini berupaya menyadarkan kita akan keadaan dunia hari ini, berikut segala konsekuensi sosial, politik, dan kulturalnya. Melalui gaya bahasa yang mudah dipahami namun padat, penulis menyajikan realita bahwa kita tengah berada di dunia di mana arus informasi mustahil dibendung, perubahan tatanan besar bisa terjadi dalam semalam, dan bahaya-bahaya yang sebelumnya tampak jauh dapat bergerak sedekat urat leher tanpa kita sadari. Sekurang-kurangnya, ada tiga fakta penting yang diungkap penulis dan layak kita perhatikan secara serius, yaitu perkembangan AI (*Artificial Intelligence*) dan kaitannya dengan pekerjaan di masa depan, terorisme siber, serta propaganda terselubung yang semakin hari semakin halus.

### Bangkitnya AI, hilangnya pekerjaan

Seribu tahun yang lalu, orang-orang yang hidup pada zaman kerajaan tidak tahu raja mana yang pasti akan bangkit atau tumbang, pemberontakan mana yang akan berhasil atau menjadi bahan tertawaan, serta berapa lama kerajaan yang mereka tinggali akan bertahan. Namun orang-orang itu tahu pasti, apa pun yang terjadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia masih sama; petani, pedagang, pegawai kerajaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seorang petani mengajari anak-anak mereka cara membajak sawah dengan benar, para pedagang mengajari cara mengatasi tawar-menawar yang alot, dan anak-anak pegawai kerajaan mengajari anak-anak mereka politik, itu masih tetap relevan sampai anak-anak tadi dewasa, bahkan sampai beberapa ratus tahun berikutnya. Namun itu tidak berlaku lagi sekarang. Teknologi AI mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Bukan tidak mungkin jika dalam beberapa dasawarsa ke depan, AI benar-benar mendominasi kehidupan manusia.

Secara umum, algoritma AI adalah menemukan pola dan menarik kesimpulan dari pola yang teramati. Sekali bajak mesin yang dikendalikan oleh komputer berteknologi AI mampu menganalisis struktur tanah dan menentukan tanaman apa yang paling mungkin memberikan hasil terbaik pada musim tanam berikutnya, apakah keterampilan-keterampilan tradisional yang diajarkan para orang tua petani kita masih relevan? Dan jika para orang tua petani kita mengajarkan keterampilan bertani semata, tanpa melihat perkembangan AI, bagaimana jika ketika dalam sepuluh tahun dunia pertanian telah didominasi oleh AI? Kita yang tidak bisa berkompetisi melawan AI dan tidak bisa menemukan pekerjaan lain tentu akan kelabakan.

AI juga sudah mulai masuk ke ranah negosiasi, itu terbukti dengan munculnya aplikasi yang bisa kita ajak mengobrol dan bertukar pendapat. Barangkali orang kemudian

menyanggah dengan mengatakan bahwa mesin tidak akan pernah mengungguli manusia dalam perbincangan, karena mesin tidak mempunyai emosi sementara manusia punya dan bisa memahami perasaan lawan bicara. Tapi, coba pikirkan ini. Emosi-emosi kita selalu muncul dalam tanda-tanda yang bisa diindra seperti gerak alis, pandangan mata, atau perubahan nada suara. AI bisa mengenali pola-pola fisik semacam itu dan menarik kesimpulan darinya. Jika alis lawan bicara terangkat, maka jawab kata-katanya dengan pola seperti ini. Dan jika nada suaranya merendah, maka jawab kata-katanya dengan pola seperti itu. Algoritma ini sepenuhnya logis dan dapat ditangani mesin. Ketika emosi terejawantahkan dalam aspek-aspek fisik, AI yang maju dapat menanganinya dengan lebih baik daripada negosiator paling ulung sekalipun.

### Terorisme siber

Terorisme biasanya adalah jalan yang diambil oleh sekelompok orang dengan daya tempur yang relatif kecil jika hendak berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada zaman kerajaan, sekelompok orang bertopeng yang membantai beberapa orang di pasar sambil menyuarakan serangkaian tuntutan pada penguasa setempat hanya akan menjadi lelucon. Sebab, kerajaan punya ancaman yang lebih serius, yaitu kerajaan tetangga. Lagipula, tidak ada media yang dapat menyiarkan aksi “heroik” mereka ke seluruh pelosok. Menjadi teroris di zaman kerajaan bukanlah pilihan cara yang ampuh untuk melawan penguasa. Agar dianggap serius, seseorang harus benar-benar punya pasukan yang mencukupi.

Sekarang, jika kita tinjau kasus 9/11, peristiwa di mana beberapa ekstrimis membajak pesawat terbang dan menabrakkannya ke gedung WTC. Dunia seketika dibuat gempar. Dengan bantuan media, kisah-kisah bom bunuh diri dapat mencapai pelosok dan membuat miliaran orang bergidik ngeri. Teroris tidak punya cukup pasukan, namun melalui aksi-aksi seperti bom bunuh diri yang menewaskan segelintir orang dapat membuat banyak orang yang sebenarnya tidak apa-apa, merasa ketakutan. Jika itu terjadi, maka teroris telah berhasil. Itulah tepatnya yang disebut teror.

Korban 9/11 hanya tiga ribu orang. Jumlah itu relatif sedikit dibandingkan korban kecelakaan lalu lintas di AS pada tahun yang sama, yaitu 42.116 jiwa. Namun terorisme memberikan efek kejut yang jauh lebih besar daripada bahaya melanggar tata tertib lalu lintas. Kesimpulannya, terorisme adalah sesuatu yang harus kita waspadai namun tidak dengan kekhawatiran yang berlebihan. Penulis juga menghimbau agar siapa pun yang mengikuti berita peristiwa terorisme tidak langsung panik lalu terpancing untuk



bertindak gegabah.

Meski begitu, terorisme siber melampaui kategori ini. Kejahatan sibernetik dapat memberikan dampak yang jauh lebih parah dan dilakukan dari jarak jauh. Bom bunuh diri hanya bisa membunuh sampai beberapa ratus orang. Namun bagaimana jika para teroris mampu mengacaukan lalu lintas udara, mengotak-atik jalur kereta api, atau menjarah perbankan yang telah terdigitalisasi? Belum lagi jika mereka menguasai teknologi nuklir.

### Propaganda terselubung

Penulis mengutip kisah film kartun Simba. Ketika Simba ingin mengetahui makna eksistensinya, Mufasa sang ayah menerangkan padanya tentang Roda Kehidupan yang agung dalam bahasa sederhana. Rusa memakan rumput, singa memakan rusa, dan ketika singa mati tubuhnya terurai menjadi makanan bagi rumput-rumput baru, begitu seterusnya dalam waktu yang tak berhingga lamanya. Roda Kehidupan menempatkan setiap binatang pada peran tertentu untuk bermain menurut perannya masing-masing dalam drama agung kehidupan. Segalanya terhubung, segalanya saling bergantung satu sama lain. Bahkan jika selembur daun saja gagal memenuhi tujuan keberadaannya Roda Kehidupan bisa terganggu.

Seiring bergulirnya cerita, Mufasa kemudian dibunuh oleh adiknya, Scar, yang menggantikannya menjadi raja dan menyalahgunakan kekuasaan. Kepemimpinan Scar mengakibatkan terganggunya keseimbangan Roda Kehidupan. Sementara itu, Simba terusir dan tumbuh di pengasingan sebagai singa buangan yang tidak tahu arah. Namun pada akhirnya, dia

mengetahui jati dirinya dan menemukan tujuan, yaitu menggulingkan kekuasaan pamannya yang lalim untuk mengembalikan keseimbangan pada Roda Kehidupan.

Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, bahwa adegan-adegan yang sangat biasa seperti singa memakan rusa atau singa-singa jantan yang saling bertarung dapat diramu menjadi kisah yang sarat akan makna mendalam yang menyentuh lubuk hati kita. Makna tidak pernah ada dalam adegan-adegan tadi, tapi kita sendirilah yang menciptakannya, baik secara sadar maupun tidak.


Kita bisa membayangkan bahwa menurut Simba, Roda Kehidupan adalah makna terdalam serta kebenaran tak terbantahkan dalam alam semesta.

mestanya. Namun dalam semesta (film) itu tidak ada manusia. Bagaimana jika manusia ada di dalamnya, dan dengan segala upaya pembangunan peradabannya mereka mencapai padang rumput tempat Simba bertahta, mem-

bunuh semua singa, serta mengebah padang rumput



**Yuval Noah Harari**  
Penulis Buku 21 Pelajaran  
untuk Abad ke-21



**P**ulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai destinasi yang banyak dipilih wisatawan karena menyuguhkan ragam keindahan alam. Banyak orang menyebutnya sebagai surga dunia. Keberadaannya semakin populer pasca pandemi Covid-19, tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, Pulau Lombok juga banyak dikunjungi karena budayanya yang unik dan penduduknya yang ramah.

Penduduk asli Pulau Lombok adalah suku bangsa Sasak. Maka dari itu, Pulau Lombok sering disebut sebagai Bumi Sasak. Di sekitar Bumi Sasak tampak ada beberapa pulau kecil. Orang Sasak menyebut pulau dengan istilah bahasa Sasak, gili, seperti halnya Gili Aer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Selat Lombok. Pulau-pulau kecil itu dikelilingi oleh perairan jernih yang tidak begitu dalam, dan berdasar gugusan kerang. Di perairan jernih di antara gugusan karang itu hidup berbagai jenis ikan dengan warna-warni yang cukup menawan.

*MENIKMATI PESONA LOMBOK DARI*  
**GILI TRAWANGAN**

Foto Aji





Keindahan alam, budaya yang unik dan masyarakat yang ramah menjadi paket wisata lengkap yang dimiliki Lombok. Tak heran bila hal tersebut selalu membawa wisatawan berkunjung kembali tanpa bosan. Bahkan saat ini keberadaan Sirkuit Mandalika menjadi magnet baru pariwisata di Pulau Lombok. Lokasinya yang hanya 15 menit dari Bandara Internasional Lombok membuat sirkuit tersebut selalu masuk daftar kunjungan wajib sebelum berkeliling ke kawasan lain di pulau yang berada sebelah timur Bali tersebut.

Namun, Mandalika tentu bukan satu-satunya pilihan wisatawan yang datang ke Lombok. Kawasan lain yang selalu menarik dan menjadi favorit, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah pulau-pulau kecil yang dikenal dengan sebutan gili di Lombok Utara. Di Gili Trawangan misalnya, kamu tidak akan menemukan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat. Sebab, pemerintah lokal Lombok tidak mengizinkan adanya transportasi untuk memastikan kualitas udaranya tetap baik dan terbebas dari polusi.

Adapun, kendaraan utama masyarakat di sana hanyalah sepeda dan delman. Begitu juga untuk para pengunjung,

Jika ingin menelusuri Gili Trawangan, tersedia penyewaan sepeda yang dibanderol Rp 25.000 untuk sepeda single dan Rp 50.000 untuk sepeda double, yang masing-masing bisa disewa selama dua hingga tiga jam.

Sementara itu, bagi wisatawan yang ingin menikmati matahari terbit alias sunrise, disarankan datang ke sekitar pelabuhan kecil Gili Trawangan mulai dari pukul sekitar 06.20 WITA. Sedangkan jika ingin menyaksikan pesona sunset di Gili Trawangan, bisa datang ke sekitaran pinggir-ran Cafe Pinkcoco sekitar pukul 18.00 WITA.

Bagi pecinta aktivitas diving, sangat tepat berkunjung ke Gili Trawangan karena terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Terdapat banyak titik selam di pulau ini seperti Simons Reef, Deep Turbo, Trawangan Slope, Coral Fan Garden, Shark Point, Bounty Reef, Halik Reed, Jack Point dan lainnya. Gili Trawangan menawarkan beberapa tipe diving, di antaranya shark diving see, UV night dive, freediving, hingga marine walk. Di pulau ini pengunjung juga bisa menemui hiu whitetip, hiu blacktip, dan mungkin juga hiu abu-abu. Ikan pari penyu, dan bumphead parrotfish juga sering terlihat di perairan ini.



# Menaja Kemandirian Kawasan Perbatasan



Aji Nur Cahyo  
ASN BSKDN Kemendagri

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan proyek multisektor. Beragam *stakeholder* dan pemangku kepentingan wajib dilibatkan dalam prosesnya. Berkelindannya pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan, membutuhkan peran yang kuat dari Pemerintah dalam mengoordinasikannya. Pendekatan pembangunan dengan mengedepankan segi keamanan dan kesejahteraan menjadi kunci, dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Infrastruktur pemerintahan yang andal jadi prasyarat.

Batas wilayah negara dan kawasan perbatasan antar negara merupakan salah satu teritori terpenting dalam kerangka kedaulatan negara. Hal ini karena secara geospasial dan demografi, kawasan perbatasan amat rentan terhadap ancaman yang berasal dari negara lain. Sementara itu, paradigma wilayah perbatasan yang dulu dianggap hanya sebagai “sabuk pengaman” kini juga telah berubah. Pemerintah saat ini tengah berfokus bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan

dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lewat Perpres 12 Tahun 2010. Setelahnya, Pemerintah menggenjot perbaikan infrastruktur perbatasan dengan membangun 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) serta 11 PLBN baru yang direncanakan rampung pada tahun 2024. Selain itu program pembangunan kolaboratif juga digalang melalui gerakan Gerbang Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas) yang mengajak 18 kementerian dan 12 gubernur.

Meski telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah, kawasan perbatasan masih memerlukan kebijakan afirmatif. Menyoal aspek ekonomi misalnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan mayoritas kawasan perbatasan negara belum memiliki tingkat perekonomian yang baik. Kondisi ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia di kawasan perbatasan yang rata-rata masih rendah jika dibandingkan dengan daerah non perbatasan. Selain itu kontribusi potensi daerah perbatasan terhadap PDRB juga minim, ditambah dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan den-

gan rata-rata nasional. Hal ini patut diwaspadai karena pengelolaan perbatasan negara tidak sekadar perkara demarkasi wilayah. Namun bagaimana Pemerintah mampu memenuhi aspek infrastruktur dasar dan sarana prasarana pendukungnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana.

Mengurai beragam permasalahan tersebut memerlukan kondisi prasyarat. Salah satunya dengan memperkuat peran dari pemerintahan di kawasan perbatasan. Sejumlah kebijakan dapat diupayakan seperti program penguatan pengayaan, dan perlindungan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. Ikhtiar ini perlu digalakan mulai dari perangkat kecamatan dan desa hingga ke masyarakat dengan mengajak TNI dan Polri serta pemangku adat sekitar. Penghayatan ini sangat penting untuk menanamkan loyalitas kebangsaan dan mencegah migrasi penduduk.

Di sisi lain, terbatasnya anggaran pembangunan dapat diatasi dengan menggaet dukungan dari program *cooperate social responsibility* (CSR) guna alternatif pendanaan.

Anggaran ini dapat diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana dasar maupun bantuan alat produksi atau permodalan bagi masyarakat. Menciptakan ketahanan pangan wilayah perbatasan juga harus diupayakan. Ikhtiar ini dapat dilakukan dengan membangun pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap mengelola potensi di bidang produksi sekunder yang bergubungan dengan pertanian, perkebunan, dan jenis industri lokal. Kecamatan dan desa dapat difungsikan sebagai balai latihan kerja untuk mendukung program tersebut.

Sementara di bidang tata kelola pemerintahan, program transformasi pelayanan publik yang didukung dengan inovasi teknologi informasi sangat penting diaplikasikan di kawasan perbatasan. Kondisi ini dapat diwujudkan bila keterjangkauan layanan telekomunikasi (blankspot) dapat diatasi terlebih dahulu, misal dengan pembangunan tower BTS. Kecamatan dapat dioptimalkan sebagai hub terjadinya inovasi layanan. Upaya ini harus ditunjang dengan percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan kemudahan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah. Guna mengukur keberhasilannya, Pemerintah mesti menyusun instrumen pengukuran (misalnya indeks tata kelola wilayah perbatasan) untuk melakukan evaluasi dan pengawasan

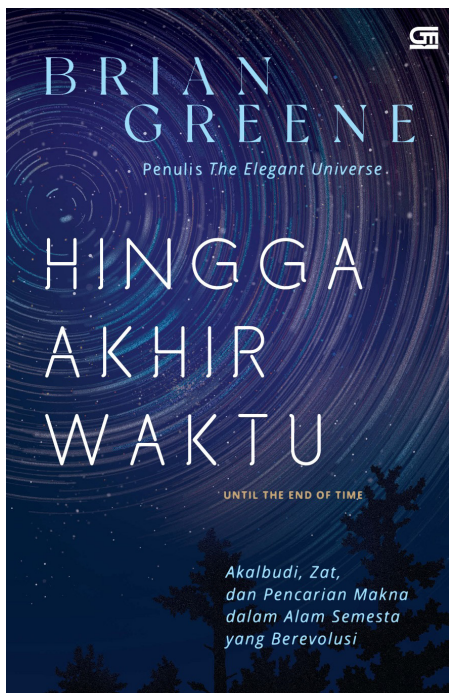
pelaksanaan program-program di wilayah perbatasan negara.

Penerapan beragam kebijakan tersebut harus menyentuh tidak hanya ruang fisik namun juga ruang sosial masyarakat. Hal ini karena karakteristik demografi masyarakat di sana masih kental dengan adat istiadatnya. Induksi kebijakan harus menghormati kearifan lokal agar retensi kebijakan minim terjadi. Sementara itu, Pemerintah perlu mengakselerasi penerapan kebijakan penguatan tersebut di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kalimantan. Mengingat 2024, Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara sudah mulai difungsikan. Kondisi ini tentu menciptakan perspektif geostrategis baru yang perlu segera mendapat perhatian.

Selain itu diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi terhadap seluruh aspek tata kelola pemerintahan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal. Peran dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan menjadi kunci dalam mengorkestrasi keterpaduan antar sektor dalam mewujudkan perbatasan yang berdaulat secara politik, ekonomi, dan budaya.



# MAKNA HIDUP DALAM PERSPEKTIF SAINS MURNI



**Judul buku:** *Hingga Akhir Waktu: Akalbudi, Zat, dan Pencarian Makna dalam Alam Semesta yang Berekvolusi*

**Penulis:** Brian Greene

**Penerjemah:** Zia Anshor

**Penerbit:** Gramedia Pustaka

Utama

**Tahun Terbit & Cetakan:**

September 2022

**Jumlah halaman:**

vi + 489 halaman

**ISBN:** 978-602-066-003-5

Obyek kajian sains meliputi segala entitas fisik yang teramati. Ini berarti bahwa apa pun yang bisa diamati di alam semesta, adalah wilayah sains. Bahkan, asal-usul alam semesta itu sendiri sudah dikaji secara ilmiah, yakni melalui teori-teori yang masuk akal, bebas SARA, dikonfirmasi lewat eksperimen yang ketat, serta siap dimodifikasi manakala ada bukti baru yang mampu menjungkirbalikkan teori-teori sebelumnya.

Kehidupan adalah bagian dari alam semesta. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan seperti bagaimana ia berawal, bagaimana cara kerjanya, dan apa makna menjadi makhluk hidup sangat mungkin dikaji melalui sudut pandang sains. Dan inilah alur yang disajikan penulis dalam buku *Hingga Akhir Waktu* ini.

Pada era kita, para ilmuwan yang diperlengkapi alat-alat percobaan, pengamatan, dan analisis matematika telah membuka jalan baru ke masa depan, yang untuk pertama kalinya mengungkap ciri-ciri khas dunia masa depan yang pasti dicapai, meski masih jauh. Walau tertutup kabut di sana-sini, panoramanya makin jelas dilihat kita sebagai makhluk pemikir, menunjukkan bagaimana kita masuk dalam luasnya bentang waktu.

Dalam semangat itulah, kita akan menelusuri lini masa alam semesta pada halaman-halaman berikut, menjelajahi kaidah-kaidah alam fisika yang menghasilkan struk-

tur-struktur teratur dari bintang dan galaksi sampai kehidupan dan kesadaran, dalam alam semesta yang ditakdirkan akan meluruh. Kita akan mempertimbangkan argumen-argumen yang menyatakan bahwa sebagaimana manusia memiliki masa hidup terbatas, begitu juga fenomena kehidupan dan akalbudi di alam semesta. Bahkan, pada suatu saat kelak, bisa saja tak mungkin ada lagi zat terorganisasi jenius apa pun. Kita akan memeriksa bagaimana sosok-sosok yang merenungi diri sendiri menghadapi ketegangan yang tersirat dalam kenyataan itu. Kita muncul dari hukum-hukum yang sejauh pengetahuan kita bersifat tak lekang oleh waktu, tapi kita ada hanya sekejap. Kita dibimbing hukum-hukum yang berlaku tanpa peduli tujuan, tapi kita terus-menerus bertanya pada diri kita ke mana kita menuju. Kita dibentuk oleh hukum-hukum yang tampaknya tidak memerlukan alasan-alasan pelandas, namun kita dengan gigih mencari makna dan tujuan. (v-vi)

Sains berusaha menjawab segala pertanyaan tentang dunia secara apa adanya, bukan sebagaimana diinginkan satu atau sekelompok orang tertentu. Dengan ini, ia mampu mengentaskan diri dari sentimen kesukuan, rasial, dan keagamaan. Sejauh ini, sains telah sangat sukses dalam menjalankan keobyektifan semacam itu.

Sains cenderung memandang obyek-obyeknya secara reduksionis, yaitu dengan anggapan bahwa obyek atau proses yang rumit terdiri dari bagian-bagian yang lebih



sederhana. Dengan mempelajari bagian-bagian yang paling sederhana, lalu mengintegrasikannya kembali, maka secara prinsip ilmuwan dapat mempelajari apa pun tentang alam. Dan memang, melalui kaca mata inilah penulis mengupas persoalan hakikat kehidupan. Tubuh manusia dipandang sebagai sekumpulan atom yang mematuhi hukum-hukum fisika. Perbedaan antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup bukanlah terletak pada adanya entitas non-fisik yang biasa kita sebut “ruh”, melainkan pada komposisi dan interaksi antar komponen penyusun mereka.

### Fisik manusia

Manusia dan batu sama-sama merupakan sekumpulan atom yang tunduk pada hukum-hukum fisika. Manusia berbeda dari batu bukan karena manusia mempunyai ruh, tapi karena atom-atom pembentuk manusia dan cara mereka saling berinteraksi satu sama lain memungkinkan manusia itu untuk menjalani proses kehidupan. Sementara susunan atom-atom pembentuk batu dan cara mereka saling berinteraksi tidak memungkinkan proses itu.

Melalui sudut pandang ini, orang dapat menarik kesimpulan bahwa manusia (serta makhluk-makhluk hidup lain) tidak mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas itu sendiri hanyalah ilusi yang terbentuk karena sebagian besar kita tidak pernah mempersepsi kaitan mendasar antara hukum-hukum alam dan tubuh fisik kita. Apa pun pilihan yang kita buat, alternatif-alternatifnya telah didiktekan oleh lingkungan sebelumnya. Meski begitu, penulis memperingatkan agar pembaca tidak menggunakan sudut pandang ini untuk melakukan tindakan tanpa tanggungjawab.

Pada Bab 5, penulis menjelaskan bahwa meskipun menurut sudut pandang sains, yang kita kenal sebagai “saya” hanyalah sekumpulan atom

dengan konfigurasi tertentu, tapi faktanya konfigurasi tersebut mampu menjaga polanya sedemikian rupa sehingga identitas personal dapat disematkan padanya. Oleh karena itu, perilaku partikel-partikel yang menyusun tubuh seseorang adalah perilakunya sendiri.

### Kehidupan dan Kekacauan

Setiap proses fisik yang terjadi di alam semesta cenderung menuju kekacauan kecuali diberikan tenaga ekstra untuk menatanya kembali. Ini adalah pernyataan Hukum Kedua Termodinamika dalam bahasa sehari-hari. Ruang yang dibiarkan begitu saja akan menjadi kotor dan berdebu kecuali jika seseorang mengeluarkan tenaga ekstra untuk membersihkan dan merapikannya. Mobil yang dibiarkan akan keropos karena karat dan melapuk, kecuali jika ada yang bersedia mengeluarkan tenaga ekstra untuk membersihkannya secara teratur.

Manusia berasal dari sel telur yang dibuahi, begitu kecil dan sederhana. Lalu secara bertahap menjadi embrio, lahir sebagai bayi, dan tumbuh dewasa sebagai makhluk hidup yang kompleks. Makhluk-makhluk hidup lain kurang lebih juga melalui proses serupa, yang jika dilihat sekilas, mereka tampak melawan hukum kedua termodinamika. Namun sebenarnya tidak demikian. Untuk tumbuh, makhluk hidup membutuhkan energi yang harus diambil dari luar tubuhnya. Tumbuhan memerlukan sinar matahari dan karbondioksida, manusia perlu memakan tumbuhan atau daging hewan agar bisa bertahan hidup, dan seterusnya. Kata kunci yang perlu diperhatikan di sini adalah “tenaga ekstra”. Singkat cerita, manusia tak ubahnya mesin yang membutuhkan bahan bakar untuk tetap beroperasi.

Sains belum bisa menjawab teka-teki besar tentang asal-usul kehidupan. Telah ada beberapa ilmuwan yang berusaha mengusulkan jawaban berdasarkan eksperimen mereka,

### Brian Greene

Penulis Buku *Until The End of Time, Hingga Akhir Waktu: Akalbudhi, Zat, dan Pencarian Makna dalam Alam Semesta yang Berevolusi*



namun jawaban-jawaban itu belum mencapai konsensus yang mantap. Meski begitu, sains tidak memerlukan konsep-konsep tentang apa pun yang non-fisik dalam menjelaskan asal-usul kehidupan. Makhluk hidup pertama muncul dari atom-atom yang tak hidup dan melalui proses-proses alamiah yang kemudian memungkinkannya untuk mereplikasi diri. Selanjutnya, atom-atom calon makhluk hidup ini beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengambil atom-atom lain yang sesuai. Dalam kurun waktu yang mencukupi, makhluk sekompleks manusia pun dapat terbentuk.

### **Menjadi manusia di alam semesta**

Manusia telah menjadi makhluk dengan kesadaran paling maju dan serta kecerdasan paling tinggi di muka bumi selama puluhan ribu bahkan ratusan tahun. Tidak heran jika kemudian manusia merasa unik, berbeda bahkan terbaik di antara makhluk hidup lain. Maka dalam berbagai budaya yang muncul di sepanjang sejarah, manusia mengklaim diri mereka sebagai makhluk yang sempurna. Kontras dengan itu, dihadapan fenomena-fenomena alam yang tak dapat mereka tanggulangi seperti kematian dan bencana alam, manusia merasa tak berdaya. Kedua perasaan inilah, spesial sekaligus tidak berdaya, yang kemudian membuat manusia mengembangkan kepercayaan-kepercayaan pada entitas-en-

titas non-fisik yang pada gilirannya berkembang menjadi agama.

Manusia dan segala aktivitasnya tidak akan ada dalam waktu yang relatif lama. Peradaban dunia semakin hari semakin maju dan canggih. Tapi ini tidak dicapai secara gratis. Kemajuan telah berdampak pada kerusakan lingkungan secara serius. Jika manusia tidak segera menyadari ini, kerusakan lingkungan akan mengarah pada bencana global yang tak terhindarkan.

Namun, bahkan seandainya umat manusia dengan cara tertentu dapat menghindari skenario ini, skenario lainnya menanti. Dalam lima miliar tahun, matahari sebagai sumber bagi segala bentuk kehidupan di bumi akan berbalik menjadi sumber bencana. Ia akan membengkak dan melelehkan batu-batuan bumi. Pengetahuan kita tentang hukum-hukum alam yang dimasukkan ke dalam simulasi komputer memungkinkan kita untuk memprediksikan hal ini.

Alam semesta pun tidak akan ada selamanya. Dan, dalam keberadaan kita yang sangat singkat ini, penulis menyarankan agar pencarian makna hidup dilakukan dengan melihat ke dalam, bukan ke luar diri kita. Penulis menutup buku ini dengan kutipan berikut:

Ketika kita bergegas menuju kosmos yang dingin dan gersang, kita ha-

rus menerima bahwa tidak ada yang namanya rancangan agung. Partikel tidak diberkahi dengan tujuan. Tidak ada jawaban akhir yang melayang di kedalaman angkasa yang menunggu penemuan. Sebaliknya, sekumpulan partikel [yang membentuk kesatuan dengan cara] tertentu dapat berpikir, merasakan, dan merefleksi. Dalam dunia subyektif ini mereka dapat menciptakan tujuan. Jadi, dalam pencarian kita untuk memahami kondisi manusia, satu-satunya arah untuk melihat adalah ke dalam [diri]. Itu adalah arah yang mulia. Ialah arah yang melupakan jawaban-jawaban yang sudah siap saji dan beralih ke perjalanan yang sangat pribadi dalam membangun makna kita sendiri. Ialah arah yang mengarah ke jantung ekspresi kreatif dan sumber narasi kita yang paling bergema. Sains adalah alat yang ampuh dan indah untuk menangkap realitas eksternal. Tapi di dalam rubrik itu, di dalam pemahaman itu, segala yang lainnya adalah spesies manusia yang merenungkan dirinya sendiri, memahami apa yang perlu dilakukannya, dan menceritakan sebuah kisah yang bergema ke dalam kegelapan, sebuah kisah yang diukir dari suara dan dierukir dalam keheningan, sebuah kisah yang mampu mengaduk-aduk jiwa.

infografis

Puja Indah memiliki:

# 12 Layanan Publik

- 1 Kesehatan
- 2 Ketenagakerjaan
- 3 Aspirasi
- 4 Kependudukan
- 5 Pendidikan
- 6 Komoditas
- 7 Ketenteraman
- 8 Ketertiban Umum
- 9 Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas)
- 10 Pekerjaan Umum
- 11 Sosial
- 12 Perhubungan dan Pariwisata

Puja Indah juga memiliki:

## 3 Layanan Tematik

- 1 Layanan e-Pendapatan Daerah
- 2 Layanan e-BumDes
- 3 Layanan e-Validasi



## Adapun 156 daerah yang berkomitmen dalam menerapkan PUJA INDAH sebagai berikut:

No.	Nama Daerah	Tahun PK	No.	Nama Daerah	Tahun PK
1	Kabupaten Bangka	2018	40	Provinsi Jawa Tengah	2019
2	Kabupaten Bangka Tengah	2018	41	Provinsi Kalimantan Barat	2019
3	Kabupaten Batang Hari	2018	42	Provinsi Maluku Utara	2019
4	Kabupaten Blitar	2018	43	Provinsi Sulawesi Selatan	2019
5	Kabupaten Bombana	2018	44	Provinsi Sulawesi Tengah	2019
6	Kabupaten Deli Serdang	2018	45	Provinsi Sumatera Barat	2019
7	Kabupaten Halmahera Tengah	2018	46	Kota Sawah Lunto	2019
8	Kabupaten Halmahera Utara	2018	47	Kabupaten Agam	2019
9	Kabupaten Katingan	2018	48	Kabupaten Dairi	2019
10	Kabupaten Kerinci	2018	49	Kabupaten Demak	2019
11	Kabupaten Ketapang	2018	50	Kabupaten Gorontalo	2019
12	Kabupaten Kulon Progo	2018	51	Kabupaten Grobogan	2019
13	Kabupaten Labuhan Batu	2018	52	Kabupaten Indramayu	2019
14	Kabupaten Lampung Barat	2018	53	Kabupaten Labuhan Batu Utara	2019
15	Kabupaten Lumajang	2018	54	Kabupaten Malang	2019
16	Kabupaten Luwu Timur	2018	55	Kabupaten Muara Enim	2019
17	Kabupaten Luwu Utara	2018	56	Kabupaten Musi Rawas	2019
18	Kabupaten Merangin	2018	57	Kabupaten Ogan Ilir	2019
19	Kabupaten Muna	2018	58	Kabupaten Pasaman	2019
20	Kabupaten Musi Banyuasin	2018	59	Kabupaten Pesisir Selatan	2019
21	Kabupaten Padang Pariaman	2018	60	Kabupaten Sijunjung	2019
22	Kabupaten Pasaman Barat	2018	61	Kabupaten Sukabumi	2019
23	Kabupaten Pati	2018	62	Kabupaten Tanah Datar	2019
24	Kabupaten Pidie Jaya	2018	63	Kabupaten Wajo	2019
25	Kabupaten Rejang Lebong	2018	64	Kota Malang	2019
26	Kabupaten Samsir	2018	65	Kota Medan	2019
27	Kabupaten Sigi	2018	66	Kota Padang	2019
28	Kabupaten Tulungagung	2018	67	Kota Pariaman	2019
29	Kota Baubau	2018	68	Kota Pekanbaru	2019
30	Kota Blitar	2018	69	Kota Surakarta	2019
31	Kota Jayapura	2018	70	Provinsi Riau	2019
32	Kota Kupang	2018	71	Kabupaten Kepulauan Sula	2021
33	Kota Magelang	2019	72	Kabupaten Aceh Tengah	2021
34	Kota Mojokerto	2019	73	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2021
35	Kota Padang Panjang	2019	74	Kabupaten Madiun	2021
36	Kota Parepare	2019	75	Kabupaten Ngawi	2021
37	Kota Sabang	2019	76	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2021
38	Kota Solok	2019	77	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2021
39	Provinsi Jambi	2019	78	Kabupaten Ponorogo	2021

## Adapun 156 daerah yang berkomitmen dalam menerapkan PUJA INDAH sebagai berikut:

No.	Nama Daerah	Tahun PK	No.	Nama Daerah	Tahun PK
79	Kabupaten Semarang	2021	118	Kabupaten Kutai Kertanegara	2022
80	Kota Sibolga	2021	119	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2022
81	Kota Sukabumi	2021	120	Kabupaten Landak	2022
82	Kabupaten Aceh Tamiang	2021	121	Kabupaten Aceh Besar	2022
83	Kabupaten Aceh Timur	2021	122	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2022
84	Kabupaten Badung	2021	123	Kabupaten Simeulue	2022
85	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2021	124	Kabupaten Mamuju Tengah	2023
86	Kabupaten Karo	2021	125	Kabupaten Nias Selatan	2022
87	Kabupaten Rokan Hulu	2021	126	Kabupaten Kaimana	2022
88	Kabupaten Sampang	2021	127	Kabupaten Manggarai	2022
89	Kabupaten Balangan	2021	128	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2022
90	Kabupaten Bangka Barat	2021	129	Kabupaten Belu	2022
91	Kabupaten Bengkalis	2021	130	Kabupaten Sumba Tengah	2022
92	Kabupaten Bengkulu Utara	2021	131	Kabupaten Timor Tengah Utara	2022
93	Kabupaten Boyolali	2021	132	Kabupaten Aceh Jaya	2022
94	Kabupaten Buton Selatan	2021	133	Kabupaten Kupang	2022
95	Kabupaten Buton Tengah	2021	134	Kabupaten Kapuas Hulu	2022
96	Kabupaten Humbang Hasundutan	2021	135	Kabupaten Kepulauan Anambas	2022
97	Kabupaten Mesuji	2021	136	Kabupaten Seluma	2022
98	Kabupaten Morowali	2021	137	Kabupaten Sikka	2022
99	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	2021	138	Kabupaten Lembata	2023
100	Kabupaten Pesawaran	2021	139	Kabupaten Merauke	2023
101	Kabupaten Pringsewu	2021	140	Kabupaten Maluku Barat Daya	2023
102	Kabupaten Pulau Morotai	2021	141	Kabupaten Pohuwato	2023
103	Kabupaten Serdang Bedagai	2021	142	Kota Bima	2023
104	Kabupaten Subang	2021	143	Kabupaten Barito Selatan	2023
105	Kota Pagar Alam	2021	144	Kabupaten Lebong	2023
106	Kabupaten Aceh Selatan	2023	145	Kota Lhokseumawe	2023
107	Kabupaten Solok	2022	146	Kabupaten Konawe Utara	2023
108	Kabupaten Berau	2023	147	Kabupaten Belitung	2023
109	Kabupaten Gowa	2023	148	Kota Kendari	2023
110	Kabupaten Magetan	2023	149	Kabupaten Kolaka Timur	2023
111	Kabupaten Nias Utara	2022	150	Kabupaten Tanggamus	2023
112	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2022	151	Kabupaten Sambas	2023
113	Kota Palopo	2023	152	Kabupaten Belitung Timur	2023
114	Kota Tebing Tinggi	2022	153	Kabupaten Kepulauan Selayar	2023
115	Kabupaten Bintan	2022	154	Kabupaten Bengkulu Tengah	2023
116	Kabupaten Bireun	2022	155	Kabupaten Buton Utara	2023
117	Kabupaten Bone Bolango	2022	156	Kota Sungai Penuh	2023



VINO G BASTIAN



LAUDYA CYNTHIA BELLA

DONNY DAMARA | DESY RATNASARI | AYU LAKSMI | RIFNU WIKANA | REZA RAHADIAN | ANJASMARA | MARTINDO LIO | MATHIAS MUCHUS | DONNY KESUMA  
BEN KASYAFANI | MELLYA BASKARANI | FERRY SALIM | MAWAR DE JONGH | WAFDA LUBIS | PRITT TIMOTHY | VERDI SOELAIMAN | REY BONG | ALFIE ALFANDY | (ALM) RICHARD OH  
YOGA PRATAMA | ROY SUNGKOND | (ALM) ADE FIRMAN | IZZATI KHANSA | COK SIMBARA | BIMA AZRIEL | A.JIL DITTO | YORIKO ANGELINE | NOVITA HARDINI | ZAYYAN SAKHA

FALCON PICTURES and STARVISION in association with MUI presents a film by FAJAR BUSTOMI "BUYA HAMKA" (ALM) NOVA SARJONO GILANG NUMEROUNO SAMUEL WATTIMENA JERRY OKTAVIANUS  
ORLANDO BASSI MARDI M IKHSAN SUNKAR PURWA TJARAKA RYAN PURWONO ALLAN SEBASTIAN IPUNG RACHMAT SYAIFULILIS VALIM SUDID CASSANDRA MASARI  
DEWI SOEMARTOJO CHAND PARWEZ SERVA FREDERICA HO NAVEEN DALLAS SINAGA VFAJAR BUSTOMI



# BUYA HAMKA

Illustrasi © Google



Ilustrasi Google

# Buya Hamka, Cendekiawan Islam Beragam Peran

**H**aji Abdul Malik Katim Amrullah merupakan sosok budayawan, sastrawan, sekaligus politikus Indonesia. Beliau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Buya sendiri merupakan gelar yang disematkan bagi ahli agama di kalangan masyarakat Minangkabau. Sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai ulama yang toleran, ia juga merupakan ketua pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Sosok Hamka menjadi salah satu tokoh inspiratif di negeri ini. Kendati dirinya sudah lama berpulang, namun karya-karyanya tetap abadi di benak masyarakat Indonesia. Sejumlah karya fenomenal Buya Hamka di antaranya meliputi novel *Si Sabaria* yang diterbitkan tahun 1928, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* terbit tahun 1938 yang diangkat dalam film pada tahun 2013. Karya Buya Hamka lainnya juga difilmkan pada tahun 2011 yakni *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Sementara itu, *Merantau ke Deli* dan *Terusir* juga menjadi karya fenomenal lainnya yang ditulis oleh Hamka.

Sosok inspiratif dengan segudang karya tersebut, kisah hidupnya diangkat dalam film biopik garapan sutradara Fajar Bustomi di bawah rumah produksi Falcon Picture dan StarVision. Total durasi yang panjang mencapai 7 jam membuat film ini dibagi menjadi tiga volume. *Buya Hamka Volume Pertama* menceritakan mengenai kehidupan Buya Hamka bersama istri dan anak-anaknya sampai Indonesia merdeka.

Sementara *Buya Hamka Volume Kedua* lebih fokus menceritakan usaha perjuangan Hamka pasca Indonesia

merdeka hingga pindah ke Jakarta dan mendirikan Al-Azhar. Kemudian *Hamka Volume Ketiga*, penonton akan diperlihatkan masa kecil Hamka hingga tumbuh besar di Maninjau Sumatera Barat, sekolah di Mekkah dan mulai berorganisasi, hingga menemukan sistem manasik haji dan membangun Islam di Indonesia.

## Film Biopik Termahal

Film *Buya Hamka* pertama kali digagas MUI. Pada 4 November 2014, Din Syamsyudin yang merupakan Ketua MUI pada saat itu menawarkan gagasan pembuatan film tersebut kepada Chand Parwez dari Starvision Plus. Chand Parwez lantas menekan Nota Kesepahaman di Kantor MUI pada 6 Januari 2015.

Banyak faktor yang menjadi penyebab lamanya pembuatan film *Buya Hamka*, seperti keperluan skenario film berdasarkan biografi kehidupan Hamka yang unik dan detail, harus bermuatan edukasi, hiburan, seni untuk menanamkan karakter anak bangsa. Pembuatan film juga membutuhkan narasi yang melukiskan imajinasi, pemikiran yang nantinya dapat mencerahkan penonton hingga beragam hal lain yang membutuhkan persiapan yang matang.

Mengingat film *Buya Hamka* merupakan film yang digagas oleh MUI, maka dalam proses produksinya pun dikawal langsung oleh MUI. Visualisasi sejarah yang detail membuat film biopik ini menghabiskan ongkos produksi termahal di Indonesia, bahkan untuk keperluan make up saja menghabiskan 3 miliar.

Film *Buya Hamka* volume pertama telah rilis pada 19 April

2023. Sosok Hamka diperankan oleh aktor kenamaan Indonesia Vino G Bastian. Cerita kehidupan Hamka pada volume pertama mengusung alur mundur, yakni berlatar tahun 1930-an sampai 1940-an. Seperti yang dijelaskan, Buya Hamka volume pertama mengisahkan kehidupan pernikahan Hamka bersama dengan istrinya Siti Raham yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella. Tidak hanya mengisahkan kehidupan rumah tangga, pada volume pertama juga menceritakan perjuangan karier hingga kiprah Hamka dalam berbagai bidang sampai Indonesia merdeka.

Selain Vino G Bastian dan Laudya Chintya Bella, Buya Hamka juga menampilkan Desy Ratnasari, hingga Donny Damara. Sementara nama-nama besar lainnya pada bagian film Buya Hamka selanjutnya menampilkan Mawar de Jongh, Donny Kesuma, Teuku Rifnu Wikana, Mathias Muchus, Reza Rahadian, Chew Kin Wah, hingga Ayudia Bing Slamet.

### **Garam Kehidupan Buya Hamka**

Film Buya Hamka dibuka dengan adegan Hamka di penjara di Sukabumi. Saat menengoknya di penjara, istri dan anak-anaknya membawakan gulai kepala ikan favoritnya dalam rantang. Rasa rindu dan haru membuat Hamka tak kuat membendung tangis ketika melihat masakan itu, air matanya menetes.

Siti Raham memintanya jangan menangis karena takut air matanya akan menetes di gulai dan menambah cita rasa asin pada masakan tersebut. Namun, Hamka mengatakan, air mata adalah garam kehidupan.

Dalam film Buya Hamka volume pertama, chemistry Vino dan Bella sebagai pasangan terlihat sangat kuat. Akting keduanya dapat menjadi obat, terutama bagi mereka yang menunggu kembalinya Bella dalam dunia perfilman Indonesia setelah sempat vakum selama empat tahun. Selain itu, film ini juga menambah daftar panjang film yang dibintangi Vino. Hal ini membuktikan, kualitas akting Vino sebagai aktor papan atas Indonesia patut diapresiasi.

Buya Hamka volume pertama juga mengisahkan perjalanan panjang karier yang dirintis sang ulama. Hamka

muda sempat menuntut ilmu di Mekkah, ia kembali ke Tanah Air saat usianya 19 tahun. Sepulangannya dari Mekah, Hamka memulai pekerjaannya sebagai seorang wartawan di Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, semasa muda ia juga dikenal aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah dan berhasil memajukan organisasi tersebut hingga terjun ke dunia politik bersama Partai Masyumi.

Keberhasilannya tersebut, membawanya menjadi pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi koran keagamaan Pedoman Masyarakat yang berbasis di Medan. Kondisi ini menyebabkan Hamka harus berpisah sementara waktu dengan istri dan anak-anaknya yang tinggal di Padang Panjang, Sumatera Barat.

Saat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin redaksi, Hamka menerima telegram yang menginfokan kematian putra keempatnya bernama Hisyam. Namun, Hamka menunda kepulangannya ke Padang Panjang karena tengah menuntaskan tenggat penerbitan surat kabar agar tetap berjalan sesuai jadwal. Kalaupun saat itu, memutuskan untuk pulang, menurut Hamka jenazah anaknya pasti sudah dimakamkan.

Melalui adegan tersebut Hamka digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang menjunjung tinggi idealisme. Hal itu cukup dominan diperlihatkan dalam sejumlah adegan lain dalam film berdurasi 106 menit tersebut. Adapun, meromantisasi sikap idealisme tokoh utama sering terjadi pada film biopik di Indonesia. Hal itu juga tercermin dalam film Buya Hamka volume pertama lewat pemilihan dialog, cara pengucapan, hingga latar musik yang heroik.

Terlepas dari itu semua, kiprah Hamka turut memperjuangkan kemerdekaan perlu terus diapresiasi. Kendati saat itu, usaha Hamka mendekati Jepang membuatnya dianggap penjilat dan dimusuhi banyak orang yang menyebabkan Muhammadiyah di Sumatra Timur terpecah jadi dua kubu. Buya Hamka akhirnya lengser dari organisasi tersebut. Berbagai peristiwa itu terus berlanjut hingga Buya Hamka mulai terlibat dalam perjuangan Indonesia sampai akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945.





# PENJAGAL MANUSIA

Oleh: Hari Taqwan Santoso

**S**ebelum peristiwa 'itu' terjadi, saya hanyalah pemuda kampung biasa. Pekerjaan saya sehari-hari buruh tani. Saya menanam dan mengetam untuk orang lain. Menyangkul tanah basah dan menyiangi gulma di pematang sawah, saya lakukan untuk orang lain. Mengemudikan mata bajak yang ditarik dua ekor sapi, itu pun saya lakukan untuk orang lain. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan yang murni untuk diri saya sendiri. Yah, saya memang diberi upah atas kerja-kerja yang saya lakukan, tapi itu soal lain. Yang jelas, apa pun imbalannya, saya ini hanya pesuruh belaka.

Pada suatu hari menjelang akhir September, saya sedang menganyam daun-daun kelapa. Atap saya sudah terlalu lapuk untuk menampung air, sementara hujan sudah turun sesekali. Saya hendak menggantinya dengan yang saya anyam ini.

Kemudian, datang sesosok pria yang tidak saya kenal sebelumnya. Tanpa ragu dia tersenyum melihat saya, menyapa saya dengan halus. Sopan santun seperti itu membuat saya merasa wajib untuk menyambutnya dengan sambutan terbaik. Saya mempersilakannya masuk dan duduk dengan sopan pula, meskipun tempat yang saya tawarkan hanya ala kadarnya.

Saya amati dari ujung rambut sampai ke kaki, pria ini benar-benar asing. Saya tahu siapa-siapa yang tinggal dalam radius tiga desa dari sini. Tapi tak pernah sekalipun saya melihat batang hidungnya di sekitar sini. Badannya kekar dan kumisnya tebal. Kulitnya bersih dan tampak terawat. Pakaiannya memang biasa tapi serapi kepala desa. Dan, ya... itu tadi: dia berwibawa. Pembawaannya tenang dan sangat percaya diri. Diamnya memancarkan hawa berkuasa, kata-katanya seperti benar dengan sendirinya. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang memaksa saya merendah di hadapannya.

"Kami membutuhkan orang seperti Anda," katanya tiba-tiba. "Kami butuh jagal manusia."

Deg! "Penjagal manusia!?"



"Ya. Kami membutuhkan seorang penjagal manusia untuk wilayah sekitar sini." Dia mengucapkan kata 'penjagal manusia' itu dengan entengnya, seperti mengatakan 'penjagal kambing' atau 'penjagal sapi'. Seolah-olah membunuh orang itu seenteng membunuh binatang.

Permintaannya terdengar janggal di telinga saya. "Penjagal manusia," saya bergumam tanpa sadar.

Pria itu mengangguk mantab sebagai tanda dia memang serius dengan kata-kata yang barusan dia ucapkan. Tidak salah bicara, tidak asal bunyi. Dia membutuhkan seorang pembunuh.

"Tapi, kenapa saya?"

"Pertanyaan yang bagus..."

Pria berwibawa itu diam agak lama, antara mengingat-ingat atau menyusun kata-kata.

"Semula saya pikir seorang jagal hewan akan menerima pekerjaan ini. Jadi saya datang ke Jolempung si tukang jagal kambing. Tapi dia menolak. Katanya, untuk menyembelih kambing orang hanya butuh keberanian, tapi untuk menyembelih manusia orang butuh kehilangan diri. Diperlukan seseorang yang rasa permusuhanannya lebih besar dari kemanusiaannya. Dia lalu mengatakan kalau dirinya punya keberanian tapi tidak kehilangan diri. Andalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Makanya saya datang kemari."

"Jolempung..." saya bergumam lagi. Sejujurnya, saya tidak habis pikir, bagaimana dia bisa tahu kalau saya sudah lama memendam rasa ini. Saya selalu ingin menyembelih orang, tapi bukan sembarang orang melainkan orang-orang dari kelompok yang sudah meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakannya. Saya ingin mencincang tulang dan daging mereka lalu saya lempar ke pinggir jalan supaya menjadi santapan anjing-anjing liar. Tentu saja, ada semacam kontra-naluri dalam kepala saya yang terus-terusan memberitahu bahwa pikiran-pikiran seperti itu adalah jahat, tidak baik, tidak benar dan karenanya tidak boleh benar-benar dilakukan. Lagipula saya sendiri, sementara mereka ada beberapa. Akhirnya

ya, gagasan untuk menggorok leher mereka itu mengendap dalam kepala saja. Maka, diberi kesempatan untuk menjadi penjagal mereka, bagi saya, seperti mendapat durian runtuh.

Tapi, bagaimana Jolempung tahu isi pikiran saya? Saya tidak pernah menceritakan kebencian yang sudah saya pendam lama itu, khususnya pada Jolempung si penjagal kambing. Untuk pertanyaan ini, si pria berwibawa hanya mengangkat bahu. Dia juga tidak tahu, pun juga tidak tertarik untuk mencari jawabannya. Yang dia tahu, saya telah menerima pekerjaan ini bahkan tanpa mengucapkan kata 'ya'. Untuk itulah, dia kemudian menyerahkan benda mirip pipa yang panjangnya sehasta dan dibungkus kain perca.

"Anda tunggu komando dari saya nanti," katanya yang lalu pergi begitu saja.

Ketika bayangan si pria berwibawa sudah lenyap ditelah semak-semak, saya membuka bungkusan yang dia tinggalkan. Isinya ternyata parang berbahan baja karbon yang sangat bagus. Bilahnya sudah diasah tajam. Bilah itu, begitu dihunus, seolah berbisik ke telinga saya bahwa dirinya telah haus. Seolah bilah itu ingin menyaksikan sendiri bagaimana urat-urat leher putus olehnya.

...

Sepuluh orang pertama dipaksa maju. Kesepuluh orang itu diikat menggunakan tambang yang sama, sebuah tambang yang cukup panjang sehingga dari ujung ke ujung, ia dapat mengunci pergelangan tangan mereka semua. Mereka melangkah dengan pasrah, melawan sudah tidak ada gunanya. Berani meronta berarti siap menerima hantaman gagang senapan laras panjang di muka. Sudah ada yang mencoba, dan hasilnya sia-sia. Justru giginya yang rontok dan bibirnya berdarah terkena dihantam pantat senapan.

Dikelilingi orang sekampung dan beberapa orang berseragam hijau yang membawa senapan tadi, mereka tahu nafas mereka barangkali hanya tinggal lima atau enam helaan lagi. Mereka digiring ke sebidang tanah landai di tepian Kali Keyang, di mana saya sudah berdiri dan siap dengan menghunus parang. Ketika orang paling depan berada dalam jangkauan, saya langsung membatat lehernya. Darahnya muncrat dan sempat memercik beberapa tetes ke muka saya, sementara kepalanya langsung putus dan menggelinding ke air. Tubuhnya bergetar sebentar meregang nyawa lalu roboh tak berdaya.

Semua orang di belakangnya sontak berteriak-teriak histeris. Mereka yang tadinya sudah pasrah mendadak meronta, berupaya sekeras tenaga untuk melepaskan diri. Mulut mereka menyuarakan permohonan agar dibebaskan karena mereka sejatinya tidak benar-benar bersalah. Mereka mengaku ditipu. Asal ikut saja dan dipaksa menerima getahnya pada-

hal tidak tahu apa-apa.

Jujur, telinga saya geli mendengar pekik-pekik itu. Alih-alih iba, saya justru kesal. Dan itu membuat tangan saya semakin ringan dalam mengayun-ayunkan parang. Tebas, tebas dan tebas. Kepala mereka semua harus putus. Itulah yang ada dalam pikiran saya saat itu. Persetan dengan perikemanusiaan karena toh mereka juga bukan manusia. Mereka adalah setan-setan yang bersemayam dalam daging dan darah. Buktiinya, mereka selalu meneror kaum beragama. Mereka inilah yang selalu mengganggu orang-orang yang ingin bertuhan.

Salah seorang di antaranya bahkan adalah tetangga saya sendiri. Beberapa waktu sebelum ini, dia mendatangi Kiai Dul Rochim di rumahnya. Dia membuat pemuka agama yang paling disegani itu bergidik ngeri hanya dengan mengutarakan saran bernada mengancam, supaya kiai itu rajin-rajin beribadah dan memperbanyak sedekah lantaran usianya tinggal beberapa hari lagi. Desas-desus yang beredar mengabarkan bahwa tetangga saya itu sudah membikin sumur yang cukup lebar dan dalam. Dasarnya ditancapi lusinan batang linggis. Bersama teman-teman yang sekelompok dengannya, tetangga saya itu sudah berencana menangkapi orang-orang yang taat beragama seperti Kiai Dul Rochim dan melemparkan mereka ke dalam sumur tersebut.

Makhluk yang begitu gencar memusuhi agama, apa namanya kalau bukan setan? Kepada setan-setan berwujud manusia itu, saya pikir bukan hanya saya seorang, tapi kita semua harus bersikap tega sebab mereka semua adalah musuh yang nyata.

Demikianlah, pada bulan-bulan berikutnya, saya mengejawantahkan apa yang sebelumnya hanya ada dalam kepala. Saya benar-benar menjadi pembunuh; seorang penjagal manusia, tapi manusia yang setan, kaum yang anti-Tuhan. Saya sudah lupa berapa tepatnya kepala yang putus oleh parang ini. Mungkin baru puluhan, mungkin juga jumlahnya sudah mencapai seratus. Namun, meski sudah mencabut banyak nyawa, saya tidak pernah merasa kasihan atau menyesal. Justru saya senang karena berhasil menumpas musuh-musuh Tuhan ditemani orang-orang kampung, pria berwibawa dan pasukan berseragam hijau. Saya tersenyum puas, begitu juga pria berwibawa itu.

# call for PAPER

## MATRA PEMBARUAN



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2023, yang akan diterbitkan pada 2 (dua) edisi yaitu Mei dan November.

Registrasi dan submit artikel anda di

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jalan Kramat Raya No.132, Senen, Jakarta Pusat  
0812 8165 6781/Shinta (Whatsapp Only)  
matrapembaruan@gmail.com



- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38000 s.d 40000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah Dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan
- Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.
- Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).
- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*).

Google Scholar

GARUDA  
SARANA KEBUDAYAAN DIGITAL

Crossref

MORAREF

neliti

# CALL FOR PAPER

# JURNAL BINA PRAJA

Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.



## JBP Journal of Home Affairs Governance

Its central aim is thereby to enhance the broad scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations, communities, societies and individuals, at international, regional, national, local, and village levels.

## April, Agustus & Desember

## TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscript may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscript should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscript have not been published in other media
- Manuscript should have a minimum of 35000-38000 character in Indonesian or English
- For the writing systematic and format, see <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/authorGuidelines>
- A minimum of 25 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduated theses, and/or other research report
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.



[jurnal.kemendagri.go.id](http://jurnal.kemendagri.go.id)

For more details | 08812 1941 9885/redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:

